



PERANAN PEMIMPIN ADAT
DALAM STRUKTUR
MASYARAKAT DONGGO

DI DESA MBAWA, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT

I Ketut Sudharma Putra
Wakhyuning Ngarsih
Dyah Chri Ekasmara
Inggit Purnama Dewi
I Putu Wiweka Abhicanika

Direktorat
Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2016

20170617

**PERANAN PEMIMPIN ADAT DALAM
STRUKTUR MASYARAKAT DONGGO
DI DESA MBAWA, KABUPATEN BIMA,
NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh :

**I Ketut Sudharma Putra
Wakhyuning Ngarsih
Dyah Chri Ekasmara
Inggit Purnama Dewi
I Putu Wiweka Abhicanika**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2016**

Peranan Pemimpin Adat dalam Struktur Masyarakat Donggo

di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

© Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali

oleh :

I Ketut Sudharma Putra, dkk.

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

Bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

I Ketut Sudharma Putra, dkk.

Peranan Pemimpin Adat dalam Struktur Masyarakat Donggo

di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

I Ketut Sudharma Putra, dkk.

viii + 76 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-602-356-128-5

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, maka penelitian berjudul “*Peranan Pemimpin Adat Dalam Struktur Masyarakat Donggo Di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat*”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan salah satu program rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016.

Penelitian ini mengkaji tentang struktur sosial masyarakat Donggo yang bertempat tinggal di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di samping itu pula dikaji mengenai peran pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo itu sendiri.

Pemimpin adat di Desa Mbawa lebih dikenal dengan istilah *Ncuhi*. *Ncuhi* dalam struktur masyarakat Donggo memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Pemimpin adat masyarakat Donggo, khususnya di Desa Mbawa telah menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Namun demikian, untuk dapat lebih mengoptimalkan peranan pemimpin adat, membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah.

Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan semua pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada orang-orang atau pihak-pihak yang telah membantu, antara lain: Kepala Desa Mbawa serta tokoh adat maupun tokoh masyarakat Desa Mbawa yang telah banyak memberi informasi dalam hubungannya dengan masalah penelitian serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penggalan data ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa hasil tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun tulisan ini

sangat diharapkan. Kami memohon maaf kepada para pembaca atas ketidaksempurnaan dalam penulisan ini. Semoga hasil tulisan ini tetap dapat mendatangkan manfaat bagi banyak pihak.

Badung, 18 Oktober 2016
Kepala BPNB Bali, NTB, dan NTT

I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si
NIP. 197106161997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
1.6. Konsep dan Landasan Teori	4
1.7. Metode Penelitian	9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	13
2.1. Lintasan Sejarah Bima	13
2.2. Letak Geografis Kabupaten Bima	18
2.3. Kependudukan	21
2.4. Sosial Budaya	24
2.5. Ras, Bangsa dan Bahasa	27
2.6. Politik dan Pemerintahan	28
BAB III ASAL-USUL DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DONGGO	31
3.1. Asal-Usul Suku Bangsa Donggo	32
3.2. Kondisi Sosial Masyarakat	36
3.3. Komunikasi Sosial Antara Pemimpin Adat dan Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari	42

BAB IV PERANAN PEMIMPIN ADAT	
SUKU DONGGO	45
4.1. Peranan dalam Bidang Politik	47
4.2. Peranan dalam Bidang Pembangunan	50
4.3. Peranan dalam Bidang Sosial-Ekonomi	56
BAB V PENUTUP	65
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69
DAFTAR INFORMAN	71
FOTO	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Geografis Kabupaten Bima	18
Gambar 2. Anak-Anak Berada Di Lingkungan Rumah	23
Gambar 3. Kehidupan dan Pakaian Sehari-Hari Masyarakat Donggo	27
Gambar 4. Peta Kabupaten Bima	30
Gambar 5. <i>Uma Leme</i> Rumah Adat Masyarakat Donggo	38
Bagan 1. Struktur Pemerintahan Adat Masyarakat Donggo di Desa Mbawa	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara multikultur dan membutuhkan perhatian serius dalam upaya pelestariannya. Secara etimologi multikultural berarti keberagaman budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa karena komposisi sosiologis masyarakat, etnis, agama dan sebagainya. Dipandang dari keberagaman etnis dan dialek, Indonesia terdiri atas 300 lebih golongan etnik, dialek dan tradisi yang berbeda antara satu dengan lainnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Drajat, 2011:3). Keragaman budaya bangsa Indonesia, dewasa ini telah mengalami perubahan dan menimbulkan perubahan sosial dalam segala aspeknya termasuk pergeseran sikap dan mentalitas dari sebagian warga negara.

Suputra (2004:2) mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami krisis multidimensional, yang mana pada awalnya ada dalam dimensi krisis ekonomi, berlanjut ke krisis politik dan sekarang sudah mengarah pada krisis sosial budaya yang menyangkut nilai-nilai moral dari kehidupan bangsa. Adapun krisis sosial budaya yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat dan memiliki implikasi terhadap pembangunan sumber daya manusia, antara lain: (1) Krisis konsep tentang kesepakatan arti "*hidup yang baik*". Masyarakat mulai mengubah pandangan tentang cara hidup yang lebih beretika dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan dan implikasinya terhadap kehidupan individu, (2) Krisis keteladanan. Masyarakat sekarang ini merasakan adanya erosi kepercayaan terhadap pemimpin terutama kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif, (3) Krisis idealisme dan citra generasi muda dalam peranannya bagi masa depan bangsa. Kurang sensitifnya generasi muda terhadap kelangsungan hidup bangsa ke masa depan serta enggan berperan

serta dalam pembangunan bangsa sesuai dengan keahlian, keterampilan dan iptek yang dimilikinya, (4) Krisis solidaritas, masyarakat sudah mulai bersikap pragmatis-materialisme-individualisme, (5) Krisis Moral, cukup banyaknya masyarakat terutama elit politik berperilaku sangat bertentangan dengan etika dan moral dalam upaya meningkatkan kualitasnya, adanya kasus membeli gelar kesarjanaaan dan kasus ijasah aspal atau bodong.

Krisis sosial budaya dewasa ini, bukan saja terjadi pada masyarakat di wilayah perkotaan, melainkan sudah merambah ke masyarakat pedesaan. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengantisipasi terjadinya krisis masyarakat, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mesti dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan dan peranan pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan atau pemecahannya. Mengingat pentingnya peranan pemimpin untuk dapat memahami struktur masyarakat yang dipimpinnya, maka BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Bali yang memiliki wilayah kerja Bali, NTB dan NTT dalam tahun anggaran 2016, melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan judul "*Peranan Pemimpin Adat Dalam Struktur Masyarakat Donggo Di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat*".

Masyarakat Bima terdiri atas tiga suku bangsa, yakni: suku Donggo, suku Mbojo dan suku pendatang (Hilir dalam Hartono, 2007:255). Masyarakat Bima sama halnya dengan masyarakat lainnya di Indonesia memiliki kepala adat atau *Ncuhi*. Kabupaten Bima selain memiliki keragaman suku bangsa, juga terdapat banyak potensi lain yang dapat dikembangkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bima pada khususnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur sosial masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat?
2. Apa peranan pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui struktur sosial masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui peranan pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

1.4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup lokasi yaitu penelitian ini dilaksanakan di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu membahas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Menambah khazanah pengetahuan mengenai peranan pemimpin adat, khususnya yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Penelitian ini dapat dipakai acuan keilmuan dalam khazanah penelitian ilmu-ilmu sosial, mengenai peranan

pemimpin adat dalam struktur masyarakat lainnya yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat:

1. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah dan pusat dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pemimpin adat.
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat, bahwa di Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Bima, memiliki pemimpin adat serta memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat.
3. Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya pemimpin adat di Kabupaten Bima, supaya terus meningkatkan peranannya.

1.6. KONSEP DAN LANDASAN TEORI

a. Konsep

1. *Konsep Peranan*

Setiadi (2011:46) menjelaskan bahwa peranan merupakan pola tindakan atau perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki status tertentu, artinya jika seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peranan. Dengan demikian, peranan mengatur pola-pola perilaku seseorang dan batasan-batasan tertentu pada perilaku di dalam pola-pola kehidupan sosial.

2. *Pemimpin Adat*

Definisi pemimpin telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satu di antaranya mengungkapkan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah kelompok atau organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan yang dia miliki. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, seperti: (1) Mempengaruhi, mengarahkan; (2) Memotivasi; (3) Melakukan komunikasi yang efektif; (4) Menghargai orang lain; (5) Mengembangkan ide-ide; (6) Manajemen Waktu (Aswantini, 2010:7). Lebih lanjut mengenai pemimpin adat adalah pemimpin yang tergolong pemimpin informal, memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan masyarakat pedesaan. Pemimpin adat bahkan dapat dikatakan sebagai agen pembangunan dalam suatu komunitas masyarakat pedesaan. Di samping itu pemimpin adat sangat diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. *Struktur Sosial*

Dalam buku *Sejarah Kebudayaan Indonesia* edisi sistem sosial, Boedhihartono, dkk (2009:8), menjelaskan bahwa struktur sosial erat kaitannya dengan organisasi sosial masyarakat. Lahirnya bangunan organisasional masyarakat sejatinya memperlihatkan struktur yang berubah dari masa ke masa. Bahkan bangunan organisasional dalam masyarakat ini dapat menunjukkan perbedaan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Struktur sosial menyangkut bagaimana suatu masyarakat menampilkan bangunan atau bentuk hubungan antarperan dan status mereka. Struktur sosial terjadi karena anggota masyarakat tidak berinteraksi secara acak. Hubungan mereka berjalan menurut suatu pengaturan (keteraturan) sosial. Dengan kata lain hubungan mereka mengikuti jaringan antara interaksi dan hubungan yang berulang serta bersifat kurang lebih stabil. Akan tetapi apabila terjadi transformasi sosial maka strukturnya bisa berubah. Struktur sosial dengan demikian cenderung merupakan suatu gambaran keteraturan statis dalam hubungan antarperan yang ada pada suatu sistem

sosial. Semakin maju suatu peradaban, struktur sosialnya makin berkembang dan menjadi makin rumit. Di sisi lain struktur sosial juga dipengaruhi oleh ideologi yang menjadi acuan masyarakat atau penguasa dalam menjalankan kegiatan, tugas, kewajiban dan wewenang mereka.

b. Landasan Teori

Sebuah teori digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, karena penelitian tidak bisa terlepas dari sebuah konstruksi teori. Singarimbun (1989:37) menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Oleh karena itu dalam menganalisis peranan pemimpin adat dalam memahami struktur masyarakat suku Donggo di Kabupaten Bima diperlukan teori sebagai landasan. Adapun teori yang dipakai dalam membahas penelitian ini adalah teori fungsi sosial dari B. Malinowski dan teori strukturasi dari Giddens.

1. Teori Fungsi Sosial

B. Malinowski berpendapat bahwa fungsi sosial terdiri atas dua tingkat abstraksi, yaitu fungsi sosial pada tingkat abstraksi yang pertama dan kedua. Fungsi sosial pada tingkat abstraksi pertama adalah fungsi sosial dalam suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan, mengenai pengaruhnya terhadap adat, pranata sosial dan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan fungsi sosial pada tingkat abstraksi yang kedua adalah fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial dalam unsur kebudayaan mengenai pengaruhnya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksud tertentu (Koentjaraningrat, 1987:167, dalam Hartono, 2007:252). Teori fungsi sosial yang dikemukakan oleh B. Malinowski relevan digunakan dalam penelitian ini. Fungsi sosial pada tingkat abstraksi yang pertama dipakai untuk

menjawab rumusan permasalahan pertama dan fungsi sosial pada tingkat abstraksi yang kedua dipakai untuk menjawab rumusan permasalahan kedua.

2. *Teori Strukturasi*

Giddens (2010:250) mengklasifikasikan term “masyarakat” menjadi dua pengertian pokok. Pengertian pertama berupa konotasi umum yaitu “asosiasi sosial” (*social association*) atau interaksi. Sedangkan pengertian kedua (pengertian lainnya) masyarakat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang memiliki batas-batas yang membedakannya dengan masyarakat-masyarakat lain yang mengelilinginya. Jika melihat kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, sesungguhnya kedua pengertian pokok tersebut masih ambigu. Totalitas masyarakat sama sekali tidak berarti selalu memiliki batas-batas yang benar-benar jelas, meskipun totalitas masyarakat tersebut lazimnya berkaitan dengan bentuk-bentuk kelokalan yang tegas.

Semua masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial sekaligus pada saat yang sama dibentuk oleh persilangan di antara berbagai sistem sosial. Sistem sosial yang beragam tersebut bisa saja sepenuhnya berada “di dalam” masyarakat atau mungkin menerobos “sisi luar” dan “sisi dalam” sehingga membentuk keragaman pola-pola hubungan potensial antara totalitas masyarakat dengan sistem antar-masyarakat. Sistem antar-masyarakat bukanlah potongan dari seluruh totalitas dan lazimnya mencakup bentuk-bentuk hubungan di antara jenis-jenis masyarakat yang berlainan. Dengan demikian “masyarakat” singkat kata merupakan sistem sosial yang sedikit “menonjol” dengan latar belakang serangkaian hubungan sistem lain yang menjadi induknya. Masyarakat menonjol karena prinsip-prinsip struktural tegasnya berfungsi untuk memproduksi segenap pengelompokan institusi yang bisa dispesifikasi lintas ruang dan waktu.

Masyarakat sebagai sistem sosial tentunya tidak terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya. Gagasan mengenai struktur

sosial identik dengan tradisi “strukturalisme” (Giddens, 2010:25). Para fungsionalis dan mayoritas pemerhati sosial biasanya memahami “struktur” sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial. Konsepsi ini kerap kali dipahami melalui perumpamaan visual, disamakan mirip seperti kerangka atau morfologi sebuah organisme atau seperti tiang penyangga sebuah bangunan. Dalam teori strukturasi kaitannya dengan analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturasi yang memungkinkan “pengikatan” waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan praktik-praktik sosial itu suatu bentuk “sistemik”. Struktur adalah tatanan sesungguhnya dari relasi-relasi transformatif yang ada pada sistem sosial. Sebagai praktik-praktik sosial yang direproduksi, tidaklah memiliki struktur, melainkan tepatnya menampilkan kelengkapan-kelengkapan struktural. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa struktur itu ada sebagai kehadiran ruang waktu, perwujudannya dalam praktik-praktik tersebut dan sebagai jejak-jejak ingatan yang berorientasi pada perilaku-perilaku para agen manusia yang pintar.

Salah satu propos utama teori strukturasi adalah aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan sarana-sarana reproduksi sistem (dualitas struktur). Dengan demikian teori strukturasi relevan digunakan dalam penelitian ini. Pemimpin adat merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam proses produksi dan reproduksi tindakan sosial. Ia muncul, tumbuh dan berkembang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakatnya. Pemimpin adat dalam kehidupan masyarakat Bima perlu dipertahankan keberadaannya, dan memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Teori strukturasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua.

1.7. METODE PENELITIAN

Pemilihan metode yang cermat untuk mengungkap permasalahan dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting agar hasil penelitian memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan serta tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji peranan pemimpin adat dalam struktur masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Metode kualitatif merupakan strategi penelitian yang menghasilkan keterangan atau data yang dapat mendeskripsikan realitas sosial dan kejadian-kejadian yang terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, hubungan kekerabatan, dan pergerakan-pergerakan sosial. Taylor dan Bogdan dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* yang ditulis oleh Moleong (2005:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penekanan metode penelitian kualitatif bukan berdasarkan pada pengukuran, tetapi lebih pada penjelasan yang bersifat holistik dan kritis (Singarimbun, 2008:54). Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: penentuan lokasi penelitian, penentuan informan, jenis sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan Kabupaten Bima sebagai lokasi penelitian memiliki alasan bahwa Bima merupakan salah satu daerah yang kental dengan budaya dan religiusitasnya. Di samping itu kabupaten yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini masih mempertahankan tradisi lokal masyarakatnya.

b. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini tidak ditekankan pada kuantitas atau jumlah banyaknya informan tetapi lebih ditekankan pada kualitas data yang didapat dari informan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik pemilihan informan secara purposive, di mana beberapa informan sengaja dipilih oleh tim peneliti. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memudahkan pencarian data dan mendapatkan hasil data yang lebih berkualitas dan mendalam.

Informan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah informan utama dan yang kedua adalah informan pendukung. Informan utama merupakan informan yang menjadi informan kunci karena hasil informasi yang didapat dari informan utama ini menjadi analisis utama dalam penelitian ini. Selain informan utama, informan pendukung juga dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informasi-informasi yang diperoleh dari informan tersebut digunakan untuk mendukung informasi-informasi dari informan utama. Selain alasan tersebut, informan pendukung juga dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peranan pemimpin adat dalam memahami struktur masyarakat Bima. Dalam hal ini, pemilihan informan utama dipilih berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memfokuskan unit analisis penelitian.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan utama dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bukan informan utama. Baik dari obyek yang diteliti, informan pendukung maupun dokumen lainnya yang relevan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan dianalisis dan disajikan. Kualitas hasil penelitian selain ditentukan oleh penggunaan jenis atau metode penelitian, juga dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam memilih dan menerapkan teknik pengumpulan data yang tepat. Kecermatan dalam hal memilih dan menerapkan teknik pengumpulan data ini sangat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari: observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan intensif di lapangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Metode wawancara digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer yang langsung diperoleh dari informan utama. Selain observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini juga dilengkapi oleh studi pustaka untuk mendukung hasil pengumpulan data di lapangan. Studi pustaka ini dilakukan sebelum dan sesudah turun lapangan. Adapun tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memperkuat data dan analisis tentang peranan pemimpin adat dalam memahami struktur masyarakat Kabupaten Bima.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1. LINTASAN SEJARAH BIMA

Berbicara mengenai masa pada masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima, maka perlu melihat terlebih dahulu periode masa yang ada di daerah Bima yang akhirnya melahirkan suku adat Donggo. Dalam sejarah kehidupan masa di daerah Bima, hiduplah masa masyarakat yang disebut *Naka*, di mana merupakan sejarah awal masyarakat yang hidup pada zaman prasejarah di Bima. Kebudayaan masyarakat Bima pada jaman *Naka* masih sangat sederhana. Masyarakat belum mengenal sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, peternakan, pertukangan atau perindustrian serta perniagaan dan pelayaran. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari dan mengumpulkan kekayaan alam yang ada disekitarnya seperti umbia-umbian, biji-bijian dan buah-buahan. Selain mencari dan mengumpulkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga sudah gemar berburu. Dalam istilah ilmu arkeologi, karena mereka mengumpulkan makanan dari hasil kekayaan alam disebut masyarakat pengumpul (*food gathering*).

Kehidupan masyarakat pada jaman *Naka* (Prasejarah) selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Masyarakat pada jaman *Naka* sudah mengenal agama atau kepercayaan. Kepercayaan yang mereka anut pada masa itu disebut *Makakamba* dan *Makakimbi*, yang dalam ilmu sejarah disebut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Menurut keyakinan mereka pada masa itu, alam beserta isinya diciptakan oleh Maha Kuasa, disebut *Marafu* atau Tuhan. *Marafu* tersebut merupakan tempat semayam di mata air, pohon-pohon besar atau batu-batu besar. Tempat untuk bersemayamnya *Marafu* disebut dengan *Parafu Ro Pamboro*.

Pada saat itu juga mereka melakukan upacara pemujaan terhadap *Makakamba Makakimbi* di tempat bersemayamnya *Marafu* yaitu *Parafu Ro Pamboro*. Upacara yang mereka lakukan disebut "*Toho Dore*". Dalam upacara tersebut dibacakan mantra atau do'a serta persembahan. "*Toho Dore*" diberikan berupa sesajen dan penyembelihan hewan. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut *Naka*.

Naka bukan hanya sebagai seorang pemimpin agama tetapi *Naka* juga merupakan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. *Naka* tersebut sangat dihormati, sehingga masyarakat pada masa itu, selain menyembah *Marafu*, mereka juga sangat menghormati arwah leluhur terutama arwah *Naka*. Masyarakat pada masa itu, sangat menjunjung tinggi asas *Mbolo Ro Dampa* (musyawarah) dan *Karawi Kabuju* (gotong-royong).

Penentu dari kemajuan masa ini ditentukan dengan kondisi geografis, hal ini dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban maju dan berkembang di wilayah sungai serta daratan rendah yang subur. Sehingga peradaban di zaman awal sejarah disebut juga sebagai '*peradaban sungai-sungai besar*'

Perkembangan politik di Nusantara bagian barat saat itu memberi peluang besar bagi Bima untuk memanfaatkan potensi geografis yang dimilikinya, sehingga abad XI disaat Raja Erlangga berdamai dengan kerajaan Sriwijaya, Erlangga berupaya untuk memajukan perniagaan di Nusantara bagian Timur melalui jalur selatan. Sehingga saat itu Laut Flores menjadi ramai, dan berdampak pula pada pelabuhan Bima yang menjadi pusat niaga di Nusantara. Bima saat itu mulai menyerap pengaruh dari luar, seperti dari Jawa, Sulawesi Selatan dan Melayu dengan tetap mempertahankan identitas lokal yang ada. Sikap-sikap selektif tersebut merupakan modal dalam perkembangan Bima selanjutnya, di mana Bima memasuki babak baru dalam sejarah yakni masa *Ncuhi*. Masa *Ncuhi* merupakan masa yang dapat dikatakan sebagai masa revolusi peradaban manusia pertama di wilayah Bima yang didasarkan pada hasil serapan dari luar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada masa *Ncuhi* ini, masyarakatnya sangat memegang teguh falsafah hidup *ndei tangara kai Ncuhi, ededu domo dou, ina mpu'u na baweki marimpa, ndei batu wae ta lele na, ndei siri wae ta nggawona*. Falsafah tersebut memiliki makna “yang dinamakan *Ncuhi* ialah manusia utama, penghulu masyarakat seasal, yang diikuti arah condongnya yang ditumpai bayangan teduhnya”. Falsafah yang menggambarkan bahwa *Ncuhi* berasal dari masyarakat dan sebagai tempat berlindungnya masyarakat. *Ncuhi* bukan raja yang absolut dan bukan sosok tokoh yang feodal. Segala hal mengenai kebijakan yang diberikan harus berdasarkan pada adat yang ada serta dilakukan dengan musyawarah bersama. Kepentingan bersama yang ditimbulkan harus dilaksanakan dengan gotong royong yang biasa dikenal dengan istilah *Karawi Kabuju*. Atas dasar adat yang dilakukan dengan musyawarah *Karawi Kabuju*, revolusi peradaban di bawah pimpinan *Ncuhi* berhasil mewujudkan kemajuan bagi masyarakatnya. Roda sejarah Bima berjalan di atas rel adat, bergerak dengan kekuatan musyawarah dan gotong-royong berhasil membawa Bima memasuki zaman baru yang lebih maju yakni masa kerajaan. Pada masa ini pula ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Kedudukan Bima dalam percaturan niaga dan politik serta agama semakin kuat, keinginan untuk membangun pun sangat besar. Pada masa itu pula pengaruh dari luar juga terus masuk, ideologi-ideologi pun bermunculan dan pada itu pula ideologi Hindu yang berpusat di Jawa paling berpengaruh. Namun ideologi tersebut tidak diterima secara utuh begitu saja, pemerintahan tetap berdasarkan adat yang dilandasi dengan musyawarah dan kekeluargaan. Raja bukanlah titisan dewa yang harus disembah atau dipuja. Raja selalu diperingatkan dengan falsafah *Tobompa ra nabu sura dou malabo dana* yang artinya, “utamakan kepentingan rakyat dan negeri daripada kepentingan pribadi, keluarga dan golongan”.

Modal dasar adat yang mengandung falsafah hidup dan kehidupan itulah putera Sang Bima yang bernama Indra Zamrud berhasil meletakkan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Bima. Raja bersama rakyat selalu men-

jujung tinggi asas musyawarah dan semangat *Karawi Kaboju* dalam hidup dan kehidupannya (Ismail Hilir, 2004:7). Pada awal abad XVII, keharuman kerajaan Bima mulai berkurang yang diakibatkan oleh tokoh yang bernama Salisi Ma Ntau Asi Peka, ia berani mengkhianati sejarah. Ia berani melanggar adat yang sudah dipertahankan oleh sumpah para leluhurnya demi ambisi pribadinya. Saat itu ia tak segan-segan membunuh tokoh-tokoh kerajaan yang dianggap sebagai penghalang. Sehingga akhirnya munculah sosok yang bernama La Ka'i dan La Mbila yang berasal dari Makassar berhasil mengalahkan Salisi. Kemudian masa kerajaan berubah menjadi masa kesultanan, La Ka'i dinobatkan sebagai sultan I Bima pada tahun 1633 dengan nama Sultan Abdul Kahir. Walaupun Islam sudah menjadi agama resmi kesultanan, namun adat yang tidak bertentangan dengan agama Islam tetap dipertahankan.

Pada masa kesultanan, peranan Bima dalam percaturan politik, ekonomi dan agama semakin besar. Sejak saat itupula hubungan dengan Makassar semakin dekat, Bima dan Makassar semakin intim yang didasari hubungan darah, agama dan politik. Makassar pun turut membantu melawan pemerintah kolonial Belanda. Para sultan Bima sepanjang sejarahnya tidak pernah lemah terhadap Belanda, sehingga wajar apabila Belanda amat membenci kesultanan Bima, walau Makassar lebih dahulu di tahun 1667 menyerah kepada Belanda (berdasarkan Perjanjian Bongaya). Pada tahun 1906 sesuai dengan isi "Kontrak Politik Panjang" (*Lange Contract*), Bima terpaksa mengakui kekuasaan Belanda, Sultan Ibrahim dan Sultan Muhammad Salahuddin tidak pernah menunjukkan persahabatan yang tulus kepada Belanda. Kedua Sultan hanya terpaksa mengakui kedaulatan Belanda dan begitu juga yang dilakukan para ulama dan masyarakat Bima. Sikap tidak kenal kompromi dengan Belanda akan mengobarkan api perjuangan dalam wujud Perang Ngali (1908-1909), Perang Rasanggara dan Perang Dena (1910). Kemudian muncul Perang Sori Utu atau peristiwa Merah Putih yang dipimpin Sultan Mahammad Salahuddin bersama seluruh rakyat melawan Belanda

pada masa transisi Belanda menyerah kepada Jepang. Kesaksian ini didasari oleh:

1. Abdul Majid Datuk, yang berdasarkan keterangan ayahnya.
2. M. Amin Daeng Emo, bahwa dalam perang Sori Utu ada di antara anggota laskar Kesultanan Bima membawa bendera Merah Putih.

Rasa benci kepada penjajah terus mengalir dalam darah sultan dan seluruh rakyat Bima. Pada masa penjajahan Jepang dan NICA, putera mahkota Abdul Kahir bersama seluruh rakyat yang bergabung dalam laskar PETA, mengangkat senjata melawan Jepang dan NICA. Pada masa itu peranan kesultanan Bima sangatlah berpengaruh, Sultan Muhammad Salahuddin selalu mendukung bantuan moril dan material kepada organisasi-organisasi pergerakan. Dalam pendidikan pun Sultan membantu melalui Badan Hukum Sara memajukan pendidikan agama, sehingga memudahkan perjalanan Muhamadiyah dalam bidang pendidikan.

Melihat perjalanan pahit pada masa sebelum menjadi kesultanan, Sultan Bima I Abdul Kahir berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi kesultanan Bima, beliau berhasil menggalang persatuan diseluruh elemen masyarakat yang ada. Hasil perjuangan yang dilakukan sejak tahun 1633 merupakan modal dasar para sultan yang memerintah sesudahnya dan faktor ini pula yang mampu menyebabkan kesultanan Bima berdiri tegak selama hampir empat abad. Jika ditinjau dari perkembangan politik pada saat itu kesultanan Bima diawal abad XVII mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, kesultanan Bima langsung mendapat tantangan dari Portugis yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dan Gelgel dari Bali. Portugis dan Gelgel berambisi menguasai Nusa Tenggara Timur (Sunda Kecil) dalam rangka melumpuhkan dominasi Makassar di Indonesia Timur. Kemudian kesultanan Bima pun juga mampu mematahkan perlawanan Belanda di Indonesia Timur. Dengan demikian kesultanan Bima telah mampu mengukir sejarah yang indah bagi bangsa dan negara (Hilir, 2004:11).

2.2. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN BIMA

Bima adalah kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kerajaan yang terpenting di Pulau Sumbawa maupun di kawasan pulau-Pulau Sunda Kecil pada kurun waktu abad ke 17-19. Dengan terbentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat melalui UU No. 64/1958, maka sebagian besar wilayah kerajaan Bima yang pada waktu itu masih berstatus sebagai Swapraja menjadi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima dengan ibukotanya di Raba-Bima. Batas wilayahnya sebagai berikut:

- sebelah utara Laut Flores,
- sebelah selatan Samudera Hindia,
- sebelah timur Selat Sape,
- sebelah barat adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu.



Gambar 1. Kondisi Geografis Kabupaten Bima

Dokumentasi : Tim Peneliti Tahun 2016

Secara fisiografi terletak pada $117^{\circ} 40' 19''$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 30' - 70^{\circ} 91'$ Lintang Selatan. Daerah Tingkat II ini terbagi menjadi sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Monta, Bolo,

Woha, Bebo, Wawo, Sape, Rasanae, Donggo dan Sanggar. Meliputi 12 kelurahan dan 131 desa atau 436 dusun (lingkungan). Luas wilayahnya 459.690 km persegi atau sama dengan dua puluh persen dan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar terdiri atas dataran tinggi dan hanya 138.924 kilometer persegi berupa dataran rendah. Keadaan geografis Kabupaten Bima dapat dilihat dalam gambar 1.

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa kondisi geografis di Kabupaten Bima sebagian merupakan dataran tinggi, dan difungsikan sebagai usaha atau kegiatan pertanian padi dan jagung.

Kabupaten Bima secara administrasi pemerintahan telah dibagi menjadi beberapa kecamatan maupun desa. Seperti halnya dengan Desa Mbawa yang berada di Kecamatan Donggo, merupakan salah satu desa yang ada dan masih tergolong tradisional. Desa Mbawa dipimpin oleh kepala desa, yang sekarang ini dijabat oleh Abdul Yani, MS. Kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh sekretaris desa dan staf. Sekretaris desa sekarang ini dijabat oleh Sukardin. Jarak Desa Mbawa dari pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten yaitu:

- Jarak desa Mbawa dari ibu kota Kecamatan Donggo 3 kilometer.
- Jarak desa Mbawa dari ibu kota Kabupaten Bima 60 kilometer.

Suhu udara desa Mbawa mencapai 33^o dan banyak curah hujan setiap tahunnya mencapai 48 hari. Desa Mbawa dibagi menjadi 10 dusun, dan masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun. Adapun 10 (sepuluh) dusun yang ada di Desa Mbawa yaitu :

1. Dusun Jango
2. Dusun Sangari 1
3. Dusun Sangari 2
4. Dusun Mangge
5. Dusun Mbawa 1

6. Dusun Mbawa 2
7. Dusun Salere
8. Dusun Sori Fo'o
9. Dusun Kambentu
10. Dusun Tolonggeru

Luas wilayah Desa Mbawa mencapai 8884 ha dengan batas-batas wilayahnya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan hutan
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mpili
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bolo
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumi Pajo

Luas wilayah Desa Mbawa seluas 8.884 hektar tersebut, difungsikan berdasarkan peruntukannya, yaitu:

- **Tanah Sawah seluas 336 hektar**

Pengelolaan lahan sawah sebagian sudah menggunakan irigasi teknis, dan sebagian lagi masih menggunakan irigasi setengah teknis. Irigasi setengah teknis kurang lebih seluas 261 hektar. Sedangkan sisanya adalah irigasi teknis. Selain tanah sawah dengan menggunakan irigasi teknis dan setengah teknis, juga masih mengandalkan pengairan dari air hujan (tadah hujan), seluas 75 hektar.

- **Tanah Kering seluas 69 hektar.**

Peruntukan tanah kering di Desa Mbawa dibagi berdasarkan peruntukannya, yaitu:

- Peruntukan untuk pekarangan, tegalan (kebun), seluas 51 hektar
- Peruntukan untuk fasilitas umum seluas 18 hektar
- Kuburan seluas 2 hektar
- Keperluan Sosial
- Masjid, Mushola, Langgar seluas 3600 m²
- Gereja seluas 300 m²

- Sarana Pendidikan 3.500 m²
- Kesehatan 1.500 m²

2.3. KEPENDUDUKAN

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk 2011, penduduk Kabupaten Bima sebanyak 443.663 jiwa yang terdiri atas 220.981 jiwa (49,81%) laki-laki dan 222.682 jiwa (50,19 %) perempuan dengan kata lain sex ratio mencapai 99,23% dan kepadatan penduduk sebanyak 101 jiwa/km². Ketidakmerataan persebaran penduduk di Kabupaten Bima dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menepati suatu wilayah. Berdasarkan persebaran per kecamatan, Kecamatan Bolo merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat 668 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Tambora dengan kondisi wilayah yang luas dan penduduk relatif sedikit, kepadatannya hanya 11 jiwa per kilometer persegi. Secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada kecamatan-kecamatan yang berada di perlintasan jalan nasional dengan laju pertumbuhan penduduk 1,24% per tahun per kecamatan.

b. Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan umur, dari jumlah penduduk sebesar 443.663 jiwa tersebut, penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan utama terdiri dari angkatan kerja sebesar 66,67% sementara yang bukan angkatan kerja sebesar 33,33%. Berdasarkan jumlah yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja tersebut dalam hal ini usia sekolah sebesar 28,32%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah terutama pendidikan dasar relatif tinggi sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik terutama terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar seperti ruang belajar dan penyesuaian ratio antara jumlah guru dengan siswa.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Salah satu cara meningkatkan mutu SDM guna mencapai tujuan pembangunan adalah dengan memperhatikan bidang pendidikan. Pendidikan sangat mutlak untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Sampai dengan tahun 2011, terdapat 921 sekolah, baik swasta maupun negeri dari tingkat TK sampai dengan SMU sederajat (termasuk SMK) terdiri dari TK 275 sekolah, SD 452 sekolah, SLTP 117 sekolah, SMU 61 sekolah, dan SMK sebanyak 16 sekolah. Jumlah Penduduk Kabupaten Bima usia 7 tahun ke atas yang memperoleh pendidikan SD sebanyak 65.651 orang, pendidikan SMP 26642 orang, pendidikan SMU sebanyak 16.636 orang dan pendidikan SMK sebanyak 3.736 orang.

d. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bima dapat dilihat dari hasil Survei Sosiol Ekonomi Nasional (SAKERNAS) 2011 yang dilakukan BPS, konsentrasi angkatan kerja yang bekerja terdapat pada sektor pertanian sebesar 60,18%, sedangkan sektor yang paling sedikit menampung tenaga kerja adalah sektor lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,11 %. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, jumlah penduduk pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD sebanyak 885 orang, SMP 684 orang, SMA dan lainnya 1.075 orang dan perguruan tinggi sebanyak 6.871 orang.

Data jumlah penduduk usia kerja yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang potensial untuk bekerja cukup tinggi. Kondisi angkatan kerja selain dilihat berdasarkan kuantitasnya, dapat juga dilihat berdasarkan kualitasnya. Kualitas angkatan kerja antara lain dapat dilihat melalui tingkat pendidikan yang ditamatkannya.

Investasi atau tambahan modal usaha merupakan kunci untuk meningkatkan hasil produksi dan menyerap tambahan tenaga kerja. Tanpa adanya investasi mustahil tambahan tenaga kerja

dapat dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan. Peningkatan kapasitas produksi akan mempengaruhi penyerapan terhadap tenaga kerja dan secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disayangkan Kabupaten Bima belum memiliki pabrik yang menampung tenaga kerja skala besar. Industri yang berkembang di Kabupaten Bima mengalami perkembangan yang relatif terlambat dan umumnya masih berskala kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja rata-rata di bawah 100 orang. Bagi anak-anak usia sekolah, selain waktunya dimanfaatkan di sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar, juga dimanfaatkan waktunya di rumah untuk bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Aktivitas anak-anak ketika berada di lingkungan rumah dapat dilihat dalam gambar 2. berikut ini.



Gambar 2. Anak-Anak Berada Di Lingkungan Rumah

Dokumentasi: Tim Peneliti Tahun 2016

Melalui gambar 2. dapat diketahui bahwa anak-anak usia sekolah sedang berada di lingkungan rumah, dan merupakan tempat bermain mereka.

2.4. SOSIAL BUDAYA

Secara kronologis penduduk Bima dapat dibagi sebagai berikut:

1. *Dou Donggo (Orang Donggo)*

Dou Donggo merupakan penduduk paling lama yang mendiami daerah Bima dibanding suku lain. Mereka dianggap sebagai penduduk asli Bima. *Dou Donggo* bermukim di daerah pegunungan dari daratan tinggi yang jauh dari pesisir. Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda dengan *Dou Mbojo* (Orang Bima). *Dou Donggo* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

a. *Dou Donggo Ele (Orang Donggo Timur)*

Mereka mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di wilayah Bima Tengah, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Wawo Tengah. Daerah pemukiman mereka terdapat di sekitar kaki Gunung Lambitu. Orang *Donggo Ele* terdiri dari orang Kuta, Teta, Sambori, Tarlawi Kalodu, Kadi dan Kaboro. Dalam perkembangannya orang *Donggo Ele* melakukan pembauran (berasimilasi) dengan orang Mbojo, sehingga keaslian adat istiadat dan bahasa mereka sudah hilang. Walaupun pada saat awal mereka kurang memahami ajaran Islam, namun saat sekarang mereka sudah menganut agama Islam. Tetapi pengaruh animisme dan dinamisme masih terlihat.

Keadaan *Dou Donggo Ele* relatif mundur jika dibandingkan dengan *Dou Mbojo*. Tetapi akhir-akhir ini mereka mulai giat mengejar ketertinggalan tersebut, mereka sudah banyak menjadi sarjana, guru dan tokoh masyarakat. Mata pencaharian mereka adalah bertani, beternak, dan berburu. Salah satu kebiasaan mereka yang amat membahayakan kelestarian hutan dan sumber air ialah gemar melakukan perladangan berpindah.

b. *Dou Donggo Ipa (Orang Donggo Seberang)*

Dou Donggo Ipa mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di sebelah barat Teluk Bima, yaitu wilayah Kecamatan Donggo

sekarang. *Orang Donggo Ipa* memiliki adat istiadat yang berbeda dengan *Dou Mbojo* pada umumnya. Pada akhir ini keaslian adat istiadat mereka sudah mulai hilang, karena dalam perkembangannya mereka berbaur dengan *Dou Mbojo*.

Dou Donggo Ipa masih ada yang belum beragama Islam. Hal ini pun dimanfaatkan oleh kaum Kristiani pada awal abad XX, pada saat kesultanan Bima dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga akibatnya sampai sekarang *Dou Donggo Ipa* menganut dua agama yakni Islam dan Kristen. Keadaan mereka hampir sama dengan *Orang Donggo Ele*, mereka relatif mundur kalau dibandingkan dengan *Orang Mbojo*.

2. *Dou Mbojo* (Orang Bima)

Dou Mbojo merupakan pembauran orang Bima dengan Makassar dan Bugis, sebagai akibat dari hubungan yang sudah terjalin dengan baik sejak masa kerajaan terutama pada masa Raja Manggampo Donggo dan Tureli Nggampo Ma Wa'Bilmana. Sejak berdirinya kesultanan Bima tahun 1633, hubungan Bima dengan Makassar semakin erat. Orang Makassar, Bugis, Sulawesi Selatan lainnya bertambah banyak datang ke Bima. Mereka terdiri dari pedagang, politisi, ulama, pelaut dan militer. Kedatangan mereka di Bima dalam rangka ikut membantu perkembangan politik dan agama di Bima. Mereka sudah menganut agama Islam. Masyarakat yang lahir dari pembauran inilah yang terkenal dengan nama *Dou Mbojo*.

Adat isitiadat dan bahasa *Dou Mbojo* tidak lain adalah perpaduan adat istiadat asli Bima dengan adat istiadat Sulawesi Selatan terutama Makassar dan Bugis. *Dou Mbojo* merupakan penganut Islam yang taat, sehingga dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari selalu diwarnai oleh Islam. Kehidupan *Dou Mbojo* berdasarkan adat dan *sara*. Walaupun dikalangan *Dou Mbojo* mengenal bermacam-macam golongan masyarakat seperti sultan/raja, bangsawan dan rakyat biasa, namun hubungan ketiga golongan tersebut tetap bersifat demokratis dalam pengertian tidak kelihatan pengaruh feodalisme.

Dalam pendidikan, *Dou Mbojo* lebih maju bila dibandingkan dengan *Dou Donggo* karena *Dou Mbojo* gemar merantau dan memiliki watak yang keras. Masalah agama paling cepat menyentuh perasaan mereka, mereka tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan pada orang yang dianggap melanggar hukum agama dan adat.

3. Penduduk Pendatang

Penduduk pendatang yang paling besar pengaruhnya ialah *Dou Malaju* (Orang Melayu) dan *Dou Ara* (orang Arab). Latar belakang kedatangan mereka ke Bima sama seperti orang-orang yang datang dari Makassar dan Bugis. Pada masa awal Kesultanan, mereka mulai datang dalam rangka menyiarkan agama Islam dan berdagang. Mereka banyak menjadi ulama dan mubalig yang terkenal pada masa kesultanan. Kedudukan mereka sebagai ulama sangat dihormati oleh semua kalangan baik rakyat maupun istana. Pada masa Kesultanan pula mereka ikut berperan dalam pemerintahan khususnya dibidang hukum sara.

Dalam perkembangannya orang Arab dan Melayu sudah ikut berbaur juga dengan *Dou Mbojo*. Begitu pula adat istiadat dan bahasanya, sampai sekarang masih ada perkampungan khusus bagi orang Arab dan Melayu yang berada di pesisir utara Kota Bima dengan nama Kampung Melayu dan Benteng. Di samping orang Arab dan Melayu, masih ada pula pendatang lain seperti orang Cina, Jawa, Madura, Flores, Timor dan Maluku. Kedatangan mereka pun sebagai pedagang dan *ambtenar*. Khusus bagi orang Cina sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi di Bima karena mereka pedagang yang ulet dan rajin. Kehidupan dan pakaian sehari-hari masyarakat Donggo dapat dilihat dalam gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Kehidupan dan Pakaian Sehari-Hari Masyarakat Donggo

Dokumentasi: Tim Peneliti Tahun 2016

Melalui gambar 3, dapat diketahui bahwa pakaian sehari-hari masyarakat Donggo, tidak terikat pada aturan-aturan adat (bebas), yang penting sopan dan rapi. Mereka dalam sehari-harinya dapat menggunakan pakaian yang sudah umum digunakan oleh masyarakat sekarang ini yaitu kaos dan celana panjang, dan dapat pula menggunakan pakaian adat setempat yaitu menggunakan kemeja, ikat kepala dan sarung, bagi kaum laki-laki.

2.5. RAS, BANGSA DAN BAHASA

Menurut sejarah perkembangannya, bahasa Bima dibagi dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Kelompok bahasa Bima lama, meliputi:

Bahasa Donggo, dipergunakan oleh masyarakat *Donggo Ipa* yang bermukim di pegunungan sebelah barat teluk meliputi Desa Kala, Mbawa, Padende, Kananta, Doridungga. Bahasa Tarlawi dipergunakan oleh masyarakat Donggo Ele yang bermukim di pegunungan Wawo Tengah, meliputi Desa Tarlawi, Kuta, Sambori, Teta, Kalodu. Bahasa Kolo dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Kolo di sebelah timur Asakota.

b. Kelompok bahasa Bima baru

Lazim disebut *nggahi Mbojo*. Bahasa Bima baru atau *nggahi Mbojo* dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima dan berfungsi sebagai bahasa ibu. Bagi masyarakat Bima lama, bahasa Bima berfungsi sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain di luar kalangan mereka. Aksara bahasa Bima banyak persamaan dengan aksara Makassar kuno dan apabila kedua aksara tersebut dibandingkan dengan aksara Sansekerta, maka dapat dipastikan asal usul keduanya berasal dari aksara Sansekerta. Menurut tingkatannya bahasa Bima dibagi dalam 3 tingkat, yaitu tingkat halus/bahasa istana, tingkat menengah yaitu bahasa sehari-hari dan tingkat rendah/kasar. Demikian pula dalam penyebutan anggota-anggota kerabat (keluarga), juga dikenal berbagai istilah dalam kekerabatan yaitu: Kakek dipanggil *Ama Ompu*, Nenek dipanggil *Ina Wae*, Bapak dipanggil *Ama*, Ibu dipanggil *Ina*, Kakak laki-laki dipanggil *Sae Mone*, Kakak perempuan dipanggil *Sae Siwe*, Ipar laki-laki dipanggil *Hera*, Ipar perempuan dipanggil *Kawalu*, Adik laki-laki dipanggil *Ari Mone*, Adik perempuan dipanggil *Ari Siwe*.

2.6. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Politik dan pemerintahan di Kota Bima bisa dilihat perubahan dan perkembangannya dari batas-batas wilayah.

Masa Awal Kerajaan

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape
- Sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Bolo

Masa Pemerintahan Raja Manggampo Donggo dan Tureli Nggampo Ma Wa'a Bimana.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

- Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Bolo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Solor

Masa Pemerintahan Tureli Nggampo La Mbila Ma Kapiri Solo (abad XV).

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Flores hingga Pulau Tengah dan Sailus
- Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Solor, Timor, Sumba, dan Sawu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Dompu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Tahun 1864

Bima melepaskan hak kekuasaannya atas pulau-pulau Glenteng, Ende dan Sumba. Luas Bima hanya 156 mil.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sumba dan Samudera Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Dompu
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Pota.

Tahun 1928

Bulan Juni 1928, Manggarai dan Pota melepaskan diri dari Bima, dan kerajaan Sanggar bergabung dengan Bima

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan selat Sumba dan Samudera Indonesia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Dompu dan Sumbawa
- Sebelah timur berbatasan dengan selat Sape, 100 depa sebelah barat pertemuan Selat Sape.

Tahun 1935

Kerajaan Dompu masuk sebagai wilayah kekuasaan Bima, dengan demikian batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

BAB III

ASAL-USUL DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DONGGO

Setiap suku bangsa memiliki ciri khas mengenai pengaturan pada masyarakatnya. Untuk itu, setiap suku bangsa menciptakan sebuah struktur dalam masyarakat untuk memperjelas aturan-aturan yang akan dikenakan atau digunakan pada masyarakatnya. Namun sebelumnya, akan dipaparkan mengenai beberapa definisi yang berkaitan dengan struktur sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:68) struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antarposisi sosial dan antarperan. Sementara itu, Hendropuspito (1999:89) menyatakan bahwa struktur sosial adalah skema penempatan nilai-nilai sosio-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang relatif lama. Sementara Firth (dalam Basrowri, 2005:67) berpendapat bahwa struktur sosial dianggap sama dengan organisasi sosial. Hal ini mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental, dimana hubungan tersebut memberikan bentuk dasar pada masyarakat serta memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisatoris.

Melalui tiga pendapat itu, maka dapat dirangkum bahwa struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara fungsional. Berkaitan fungsional artinya apabila terjadi perubahan pada salah satu unsur tersebut maka unsur yang lain akan mengalami perubahan. Unsur pembentuk masyarakat seperti manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat, tempat tinggal atau

lingkungan kawasan tempat masyarakat berada, serta kebudayaan dan nilai serta norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemimpin adat pada suku bangsa Donggo dibutuhkan informasi mengenai struktur sosialnya. Bab ini akan mendeskripsikan mengenai struktur sosial suku bangsa Donggo. Dengan pembahasan meliputi asal usul suku bangsa Donggo, kondisi sosial masyarakat suku bangsa Donggo dan komunikasi sosial antara pemimpin adat dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3.1. ASAL-USUL SUKU BANGSA DONGGO

Orang Donggo dikenal sebagai penduduk asli yang telah menghuni tanah Bima sejak lama. Mereka sebagian besar menempati wilayah pegunungan. Letak tempat tinggal yang berada di atas ketinggian rata-rata tanah Bima, menjadikan suku Donggo memiliki cara hidup yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani masyarakat Bima saat ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hilir (2004:15-19) juga berpendapat bahwa, orang Donggo (*dou Donggo*) dibagi menjadi dua (2), yaitu:

- a. *Dou Donggo Ele* (Orang Donggo Timur)
Dou Donggo Ele mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di wilayah Bima Tengah, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Wawo Tengah, tepatnya di kaki gunung Lambitu. Orang *Donggo Ele* terdiri atas orang Kuta, Teta, Sambori, Tarlawi, Kalodu, Kadi dan Kaboro.
- b. *Dou Donggo Ipa* (Orang Donggo Seberang)
Mendiami daerah dataran tinggi pegunungan di sebelah barat Teluk Bima, yaitu wilayah Kecamatan Donggo sekarang. Salah satu alasan mereka umumnya mendiami wilayah pegunungan karena terdesak oleh penduduk pendatang yang menyebarkan budaya dan agama baru pula, seperti agama Islam, Kristen dan bahkan Hindu/Budha.

Orang Donggo adalah salah satu kelompok sosial dan merupakan penduduk asli yang berdiam di sebagian wilayah Kabupaten Dompu dan wilayah Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa sumber tertulis menunjukkan bahwa wilayah asal mereka ini adalah di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, serta empat wilayah kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu Kecamatan Huu, Dompu, Kempo, dan Kilo. Wilayah keempat kecamatan ini memang berbatasan dengan Donggo tadi. Orang Donggo menggunakan bahasa Mbojo seperti juga anggota suku bangsa Mbojo (Bima) (<http://web.bimacenter.com/2012/05/asal-usul-masyarakat-bima-dou-mbojo.html>). Diakses tanggal 26 agustus 2016).

2. Asal Mula Orang Donggo

Mengenai asal mula orang Donggo (*Dou Donggo*), ada beberapa sumber yang dapat dipakai sebagai pedoman berdasarkan versinya masing-masing. Berikut akan disampaikan beberapa versi yakni:

a. *Suku Donggou: Suku dari Gunung*

Berdasarkan hasil pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*), tanggal 15 Juni 2016, yang dijelaskan oleh seorang *ompu* (kakek) didapatkan informasi bahwa orang Donggo, khususnya yang tinggal di Desa Mbawa yang datang pertama kali berasal dari daerah gunung (daerah bagian utara). Mereka datang ke Desa Mbawa, kemudian menetap tinggal di sana. Ketika mereka datang sudah ada beberapa orang penduduk yang berasal dari berbagai wilayah. Seiring dengan berkembangnya masyarakat (bertambahnya jumlah penduduk), kemudian mereka membentuk struktur/organisasi pemerintahan desa di bawah kepemimpinan *Ncuhi*. *Ncuhi* dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh *Ndoi-Ndoi*, yang berjumlah 12 orang. Adapun 12 orang *Ndoi* yang dimaksud yaitu: *Ndoi Keto Rasa*, *Ndoi Pahawoha*, *Ndoi Tuta Rasa*, *Ndoi Lancoini*, *Ndoi Ntiva*, *Ndoi Roho*, *Ndoi Karya Dewa*, *Ndoi Paninta*, *Ndoi Sorojara*, *Ndoi Putanawa*, *Ndoi Kadal*. Berdirinya struktur organisasi sosial yang dinamakan *Ncuhi* ini sudah cukup

lama, yaitu sebelum datangnya penjajahan dan terbentuknya pemerintahan NKRI. Pada masa itu *ompu* menyebutnya sebagai masa tahun pertama (masa reformasi). Lebih lanjut, *ompu* juga menuturkan bahwa keberadaan masyarakat di Desa Mbawa dikelompokkan berdasarkan dua jaman (masa), yaitu:

– Masa Awal (Tahun pertama)

Pada masa ini terjadi masa reformasi antara masyarakat Donggo dengan Masyarakat Bolo. Pada masa itu terjadilah perang saudara antara Donggo dengan Bolo, karena orang Bolo tidak mau menerima datangnya orang Katolik. Setelah peristiwa perang, kemudian datang orang Sumbawa. Dalam perjalanannya menuju Desa Mbawa, mereka sambil beristirahat, sempat membuka lahan pertanian. Setelah berhasil punya sawah, mereka diusir lagi oleh orang Dompu kemudian sampailah mereka di daerah Donggo (Desa Mbawa), dan tinggal di sana sampai sekarang.

– Masa datangnya orang-orang dari Desa Kala

Nenek moyang orang Mbawa juga ada yang berasal dari Desa Kala. Orang-orang dari Desa Kala datang dan kemudian menetap tinggal di sana. Pada masa ini adalah masa kedatangan orang-orang dari Desa Kala, sampai akhirnya masuk pengaruh Islam. Pada masa itu *Ncuhi* bertindak sebagai pemimpin pemerintahan dan memperoleh tanah jaminan. Tanah jaminan ini dapat diolah dan dimanfaatkan hasilnya oleh *Ncuhi*. Sekarang ini tanah jaminan ini diambil alih oleh pemerintah. Setelah terbentuknya pemerintahan yang sekarang, tanah jaminan yang diolah oleh *Ncuhi* diambil alih oleh desa, dan hasilnya diperuntukkan untuk kepala desa dan perangkatnya.

b. Sang Haji, Sang Nenek Moyang

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Ompu* Ngiwa (ketua *Ndoi* Roho), tanggal 14 Juni 2016, menuturkan bahwa nama Desa Mbawa diambil dari kata Mbawa yang berarti berwibawa. Diceritakan bahwa nenek moyang orang Mbawa adalah seorang

yang sangat sakti bernama Sang Haji. Beliau menuturkan bahwa perkembangan masyarakat Desa Mbawa dibagi menjadi tiga babak (jaman), yaitu :

1. Jaman Terbang
2. Jaman Hilang
3. Jaman Mati

1. Jaman Terbang

Jaman terbang adalah jaman datangnya orang sakti yang diberi nama Sang Haji. Nenek moyang masyarakat Mbawa yaitu Sang Haji merupakan orang sakti yang dapat terbang, bahkan bisa berjalan di atas laut. Sang Haji hadir di Desa Mbawa pada jaman terbang. Beliau telah memiliki anak cucu dan sebagai penerus keturunan sampai sekarang.

2. Jaman Hilang

Pada jaman ini diceritakan bahwa Sang Haji menghilang pada suatu tempat dan sampai sekarang tempat itu sangat dikeramatkan oleh masyarakat Desa Mbawa. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa beliau, keturunan (anak cucunya) selalu melakukan doa di tempat itu. Diceritakan pula bahwa ditempat menghilangnya Sang Haji muncul sebuah batu. Batu sebagai tanda atau tempat menghilangnya Sang haji, bentuknya seperti kubur. Batu yang muncul itu sebagai pengganti Sang Haji yang telah menghilang. Tempat menghilangnya Sang haji sampai sekarang dipakai oleh masyarakat sekitar sebagai tempat memohon doa, mengadakan ritual dan dipandang sebagai tempat keramat.

3. Jaman Mati

Jaman terakhir dinamakan jaman mati. Pada jaman ini telah terbentuk susunan kemasyarakatan, dan selanjutnya telah terbentuknya masyarakat adat. Masuknya pengaruh budaya luar dan agama-agama baru, dikembangkan dalam sebuah adat yang dipimpin oleh ketua adat (*Ncuhi*). Terbentuknya ketua adat (*Ncuhi*) dan *Ndoi-Ndoi* yang membantu dalam

menjalankan pemerintahan, pada masa-masa selanjutnya memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat di Desa Mbawa.

3.2. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT

A. Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan masyarakat Donggo terdapat seorang pimpinan adat yang disebut *Ncuhi*. *Ncuhi* membawahi beberapa *Ndoi* (sebanyak 12 orang *Ndoi*). Bagi orang Donggo, kata *Ncuhi* mungkin sering didengar. Ada yang mengidentikkan *Ncuhi* dengan kepala Suku. Ada yang mendefinisikan dengan sosok yang sakti dan penuh kharisma. Ada pula yang menyamakannya dengan kepala desa (dulu *gelarang*). Semua definisi di atas adalah benar karena *Ncuhi* adalah seorang pemimpin dalam suatu masyarakat. Pada jaman dulu sebelum Bima memasuki masa kerajaan, wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan para *Ncuhi*. Mereka menguasai lembah dan gugusan pegunungan di sekitarnya. Nama para *Ncuhi* terilhami dari nama wilayah yang dikuasainya. *Ncuhi* adalah pemimpin yang kharismatik tradisional. Untuk diangkat menjadi *Ncuhi* adalah memang seseorang yang memiliki kharisma, kemampuan, ketrampilan dan kesaktian.

Ncuhi memiliki makna kuncup atau cikal bakal kehidupan terutama bagi tumbuh-tumbuhan. Abdullah (2004:78) menyatakan bahwa menurut tuturan orang Bima yang turun temurun dengan rujukan "*nuntu ma ntoi*" (tuturan kisah zaman dahulu), bahwa yang dimaksud dengan *Ncuhi* adalah "*edaru domo dou, ina mpu'u naba weki ma rimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na*", yang artinya sebagai berikut:

- a. '*Ncuhi edaro domo dou, Ncuhi* adalah orang yang menjadi sumber kelahiran bagi keturunan secara terus menerus
- b. *ina mpu'u naba weki ma rimpa* yakni merupakan manusia pertama yang menjadi cikal bakal kelompok masyarakat

- c. *di siri wea nggawo na* yakni ia akan menjadi pihak yang bertanggungjawab memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat
- d. *di batu wea lele na'* yakni untuk menjadi sumber ikutan dan panutan di mana segala tutur dan perintahnya wajib ditaati

Sementara itu dalam syair Bima dikemukakan sebagai berikut: *ndi tangara kai Ncuhi, ederu duma na ba dou, ndi batu weata lelana, ndi siri weata nggawona* (yang dinamakan *Ncuhi* adalah orang-orang pilihan. Untuk diteladani tingkah lakunya, numpang bernaung di bawah kebijaksanaannya). Sehingga, *Ncuhi* adalah pemimpin tertinggi serta pimpinan wilayah dan dianggap sebagai seorang sakti. Dengan kesaktiannya itu, maka para *Ncuhi* berfungsi sebagai pimpinan adat dan sekaligus sebagai pemimpin kegiatan spiritual. Dengan dasar itulah, untuk memisahkan wilayah-wilayah kekuasaannya masing-masing *Ncuhi* disebutkan dan dibatasi dengan nama lembah atau gunung yang dikuasainya.

Orang yang dapat menjabat sebagai *Ncuhi* adalah mereka yang berasal dari *rafu* (keturunan) Winte dan Guli. Setelah menjadi seorang *Ncuhi*, ia berhak tinggal di rumah adat/tradisional. Rumah tradisional suku bangsa Donggo disebut dengan *Uma Leme* atau *Uma Lengge*. Rumah ini memiliki ketinggian 5 sampai 7 meter dengan ukuran sekitar 3 x 4 meter. Rumah adat (*Uma Leme*) terdiri atas atap *uma* atau *butu uma* yang terbuat dari daun alang alang, langit-langit atau *taja uma* yang terbuat dari kayu lontar, serta lantai tempat tinggal terbuat dari kayu pohon pinang atau kelapa. Pada bagian tiang *uma* juga digunakan kayu sebagai penyangga, yang fungsinya sebagai penguat setiap tiang-tiang *Uma Lengge*. *Uma Lengge* terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama digunakan untuk menerima tamu dan kegiatan upacara adat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus dapur. Sementara itu, lantai ketiga digunakan untuk menyimpan bahan makanan, seperti padi dan palawija.



Gambar 5. Uma Leme Rumah Tradisional Masyarakat Donggo

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, Tahun 2016

B. Struktur Pemerintahan Adat

Pemimpin adat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, membutuhkan beberapa tenaga (orang) yang dapat diajak bekerjasama dalam memimpin masyarakat. Untuk itulah perlu adanya struktur organisasi, serta orang-orang yang menduduki jabatan dalam struktur keorganisasian tersebut. Struktur organisasi yang paling sederhana, biasanya terdiri atas ketua, bendahara dan sekretaris. Selain ketua, bendahara dan sekretaris, kadang ada pula beberapa orang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kepemimpinan (berkedudukan sebagai anggota dalam struktur keorganisasian). Demikian pula halnya dengan struktur pemerintahan adat yang ada di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Mengenai struktur pemerintahan adat di Desa Mbawa dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Kalimone. Jumlah warga yang pindah dari Desa Dena (Sumbawa Besar), sebanyak 12 orang. Setelah mereka menetap di Desa Kalimone mereka bekerja dengan mengolah lahan pertanian (sawah). Setelah tinggal beberapa lama di Desa Kalimone, mereka diusir lagi oleh penduduk setempat, kemudian pindah dan menetap tinggal di Desa Mbawa. Sebelumnya Desa Mbawa adalah hutan rimba. Keduabelas orang inilah yang kemudian menurunkan keturunan di Desa Mbawa, dan mereka membentuk kelompok tersendiri. Keturunan dari 12 orang tadi sampai sekarang masih mengakui dirinya sebagai satu keturunan, yang dikenal dengan istilah *rafu*. Keduabelas *rafu* yang ada di Desa Mbawa, memiliki seorang pemimpin yang di beri sebutan *Ndoi*.

Keduabelas *Ndoi* yang ada serta fungsinya, akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. *Ndoi* Keto Rasa, dipimpin oleh Imanuel Ibrahim.
Tugasnya menjaga keselamatan di ujung kampung. Menjaga keamanan kampung dari gangguan masyarakat luar. Apabila ada masyarakat yang mau mengganggu, supaya tidak sampai masuk kampung.
2. *Ndoi* Pahawoha, dipimpin oleh Gabriel Ngari.
Tugasnya menjaga keamanan kampung.
3. *Ndoi* Tuta Rasa, dipimpin oleh Ndoli.
Tugasnya menjaga keamanan kampung dari serangan musuh, termasuk manusia gaib dan roh-roh jahat.
4. *Ndoi* Lancoini, dipimpin oleh Ompu Tolu.
Tugasnya menyembuhkan masyarakat yang terkena musibah. Bila salah satu warga masyarakat mengalami musibah, mereka biasanya bertanya kepada dukun. Untuk dapat mengetahui penyebab musibah, biasanya dukun membacakan mantra-mantra yang diawali dengan membakar lilin. Dukun dalam bahasa Bimanya dinamakan *sando*.
5. *Ndoi* Ntiva, dipimpin oleh Dudu.
Tugasnya menyembuhkan masyarakat yang khusus terkena penyakit gatal-gatal.

6. *Ndoi Roho*, dipimpin oleh *Ompu Ngiwa*.
Tugasnya mengobati masyarakat yang mengalami gangguan fisik, seperti rematik.
7. *Ndoi Karya Dewa*, dipimpin oleh *Lomuru*.
Tugasnya melantik para dukun yang baru, termasuk juga *Ncuhi*.
8. *Ndoi Paninta*, dipimpin oleh *M. Said*.
Tugasnya memohon doa supaya terhindar dari bahaya, khususnya petir dan gemuruh.
9. *Ndoi Sorojara*, dipimpin oleh *Yusup*.
Tugasnya memohon doa keselamatan masyarakat yang mengalami sakit muntah darah.
10. *Ndoi Putanawa*, dipimpin oleh *Adi*.
Tugasnya memohon doa (membantu mendoakan masyarakat yang sakit). Mereka sudah berobat dan nyawanya sudah hampir hilang (dicabut). Mereka mohon bantuan *Ndoi Putanawa*, supaya sembuh kembali. Setelah sembuh biasanya mereka bernazar memotong kerbau atau kambing.
11. *Ndoi Kadalu*, dipimpin oleh *Salisi*.
Tugasnya membantu mendoakan dan mengobati masyarakat yang mengalami penyakit pada tangan dan kaki, yang sudah hampir putus. Bahkan pihak dokter menyarankan untuk amputasi. Ada pula warga yang menderita penyakit pada tangan dan kaki sampai hampir putus. Hal itu disebabkan karena terlambat mohon doa kepada *Ndoi Kadalu*.
12. *Ndoi Ncuhi Sang Haji Lua Lembo*, dipimpin oleh *Yoseph*.
Tugasnya mengobati masyarakat yang terkena penyakit bengkak beri-beri. Di samping itu *Ndoi Ncuhi* ini merupakan pusat dari segala *Ndoi* yang ada di Desa Mbawa.

3.3. KOMUNIKASI SOSIAL ANTARA PEMIMPIN ADAT DAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu melakukan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Demikian pula terjadinya komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, maka seorang pemimpin benar-benar mengetahui kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut menunjukkan adanya kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin. Komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat, dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sosial, seperti saat membangun rumah, melaksanakan upacara adat, dan memecahkan berbagai permasalahan sosial.

a. Komunikasi dalam Membangun Rumah

Sebelum membangun rumah, masyarakat Donggo khususnya yang ada di Desa Mbawa, mendatangi rumah *panggita* (tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal membangun rumah). Masyarakat biasanya membawa kelengkapan upacara ke rumah *panggita*. Sarana upacara tersebut terdiri atas: uang, buah pisang, *karabah* (padi yang digoreng), sirih pinang, *karakdo* (beras direndam lalu ditumbuk). Sarana upacara tersebut dipersembahkan bertujuan untuk memohon keselamatan, khususnya bagi mereka yang akan membangun rumah. *Panggita* memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Donggo, khususnya dalam kegiatan membangun rumah. *Panggita* dalam membangun rumah, memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk kepada warga yang akan membangun rumah. Di samping itu pula, membacakan doa-doa demi keselamatan warga yang akan membangun rumah. Selama proses pembangunan berlangsung, *panggita* membacakan doa selama tiga kali. Pembacaan doa-doa itu dilakukan pada tahap-tahap tertentu, yaitu pada awal membangun rumah, pada saat rumah telah berdiri, dan pada saat rumah selesai dibangun, dan siap untuk ditempati.

Berikut akan dijelaskan salah satu doa dalam membangun rumah, yaitu doa saat awal membangun rumah. Doa awal membangun rumah dinamakan *doa roko*. Adapun bunyi doa saat mengawali membangun rumah yaitu :

*“Soropodo Wa Rumata Allah
Amara Ompu Nabi Ada
Bunesa ntika Ake Mbeipu Hi,ima Nggi,i
Pakena Ma tenggo
Dei roko kai uma Ake”*

Artinya :

Kita Meminta Tuhan
Kita Memohon kepada Nenek Moyang
Kasi Daging yang utuh
Berilah kami tulang yang kuat
Di saat kami mendirikan rumah ini.Amin.

b. Komunikasi Saat Menjalankan Aktivitas Upacara Adat

Komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya diharapkan selalu untuk dilakukan. Komunikasi dapat dilakukan kapan saja, dan di mana saja. Salah satunya dapat dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara adat. Demikian pula pemimpin adat yang ada di Desa mbawa dengan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka juga selalu mengadakan komunikasi selama melaksanakan aktivitas upacara adat. Seperti saat pelaksanaan upacara *raju* misalnya, mereka selalu mengadakan komunikasi. Pada saat persiapan upacara mereka mengadakan musyawarah dan doa bersama terlebih dahulu. Mereka bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai berbagai sarana upacara yang perlu dipersiapkan, jalannya pelaksanaan upacara, dan lain lain.

c. **Komunikasi dalam Memecahkan Berbagai Permasalahan Sosial**

Permasalahan sosial akan selalu muncul dan ada dalam suatu masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern. Permasalahan sosial wajib untuk dipecahkan bersama, sehingga tidak menimbulkan dampak yang semakin parah. Masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belakangan ini, telah banyak diperbincangkan oleh para ahli atau ilmuwan sosial, di antaranya mengenai kemiskinan, kenakalan remaja, maupun ketertiban dan keamanan dan lain-lain.

Permasalahan sosial khususnya yang ada di Desa Mbawa, juga ada ditemui dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah kehidupan para remaja. Remaja dalam pergaulannya sekarang ini telah banyak yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam adatnya. Seperti larangan-larangan bagi pria untuk datang dan berkunjung ke rumah perempuan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka orang tua gadis dan pemuka adat berhak untuk mengawinkan kedua orang yang berlainan jenis tersebut, walaupun tidak ada perasaan saling cinta. Apabila pihak pria menolak untuk dikawinkan, hal tersebut dimusyawarahkan kembali dengan mendatangkan pihak keluarga kedua belah pihak dan saksikan oleh pemuka adat. Pemuka adat dengan kedua belah pihak keluarga yang bermasalah, terus mengadakan komunikasi untuk mendapatkan jalan keluar.

BAB IV PERANAN PEMIMPIN ADAT SUKU DONGGO

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Asas desentralisasi memberi peluang serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, secara otomatis pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Di samping itu pemerintah daerah juga dapat menentukan sendiri sistem pemerintahan terendah berdasarkan asal-usul dan kondisi masyarakat setempat. Seperti misalnya kelembagaan adat yang terdapat dalam masyarakat Donggo, Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lembaga adat yang mewadahi masyarakat Donggo dipimpin oleh seorang *Ncuhi* yang beranggotakan dua belas *Ndoi*. *Ncuhi* dalam pandangan masyarakat tradisonal Donggo adalah sosok pengayom, pelindung serta penjaga kehidupan. Tidak sembarang orang dapat menduduki posisi sebagai *Ncuhi* dalam struktur masyarakat Donggo. Ada beberapa faktor penentu yang menjadikan seseorang dapat dipilih menjadi seorang *Ncuhi*. Faktor tersebut di antaranya: faktor keturunan dan faktor agama. Dilihat berdasarkan faktor keturunan, seorang *Ncuhi* haruslah berasal dari keturunan *rafu winte dan guli*. Selain *rafu winte dan guli*, tidak diperkenankan menduduki jabatan sebagai seorang *Ncuhi* dalam struktur masyarakat Donggo. Sedangkan dipandang dari faktor agama, seorang *Ncuhi* haruslah beragama Katolik. Hal ini berkaitan dengan simbol upacara yang berupa daging babi. Oleh karenanya masyarakat selain Katolik tidak diperkenankan menjadi pemimpin adat. Terlebih lagi apabila ia adalah seorang muslim. Meski tidak diperkenankan menjadi *Ncuhi*, mereka tetap diberi kesempatan mengikuti upacara adat.

Ncuhi memiliki tugas utama mengatur tata kehidupan anggota kelompok dan menjaga keamanan di dalam kelompoknya sendiri maupun gangguan kelompok lain (Sahidu, 2008:1). Melihat hal tersebut, tidak mengherankan apabila kepemimpinan *Ncuhi* di Desa Mbawa sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping itu, pemimpin adat di sini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur masyarakat Donggo. Menurut Robbins (2003) pentingnya peran pemimpin dalam suatu masyarakat dapat ditunjang oleh beberapa hal, di antaranya: kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi masyarakat menuju pencapaian sasaran; kemampuan memandu dan memotivasi masyarakat menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan, peran dan tugas; kemampuan menginspirasi masyarakat untuk melampaui kepentingan pribadi mereka; serta kemampuan membawa dampak yang mendalam dan luar biasa untuk masyarakat yang dipimpinnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I bahwa peranan dalam hal ini memiliki konsep sebagai pola tindakan atau perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki status tertentu. Artinya jika seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peranan. Dengan demikian, peranan mengatur pola-pola perilaku seseorang dan batasan-batasan tertentu pada perilaku di dalam pola-pola kehidupan sosial (Setiadi, 2011:46).

Seperti halnya pemimpin adat masyarakat Donggo yang disebut dengan *Ncuhi* ini. Sebagai orang yang memiliki status tertentu dalam hal ini ia memiliki posisi sentral pada struktur masyarakat Donggo, ia telah melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Hak sebagai seorang *Ncuhi* salah satunya adalah dapat menempati *uma leme* (rumah *Ncuhi*). Secara harfiah, *uma leme* berasal dari dua kata yaitu *uma* yang memiliki makna rumah dan *leme* yang memiliki makna tinggi. Jadi dalam hal ini, *uma leme* memiliki makna rumah tinggi yang berfungsi sebagai wadah pemersatu dan pusat dari segala kegiatan adat yang ada di desa Mbawa. Sedangkan kewajiban *Ncuhi* adalah

hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang *Ncuhi*. Apabila hak-hak dan kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh seorang *Ncuhi*, maka dapat dikatakan bahwa ia telah menjalankan peranannya. Secara garis besar peranan pemimpin adat (*Ncuhi*) dalam struktur masyarakat Donggo diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: peran pemimpin adat dalam bidang politik, pembangunan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya ketiga peranan pemimpin adat tersebut akan dijelaskan secara lebih mendalam pada pembahasan di bawah ini.

4.1. PERANAN DALAM BIDANG POLITIK

Dalam kehidupan bersama sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hubungan khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur. Terdapat kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh beberapa anggota masyarakat yang sekaligus melahirkan aturan-aturan tersebut. Bagaimana aturan tersebut dipelihara dan dilaksanakan serta pemberian sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar aturan. Hubungan semacam inilah yang disebut dengan politik. Ada masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta aturan yang mengatur.

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota atau negara. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Politik sendiri memiliki beragam definisi. Seperti yang tertulis dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono* (1993). Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Sementara David Easton mengartikan politik sebagai semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan.

Sebagai sebuah aktivitas maupun kegiatan, politik yang ada di Desa Mbawa terlihat dari pola kepemimpinan yang melembaga dalam masyarakatnya. Terdapat dua pola kepemimpinan di Desa Mbawa sendiri yaitu secara administratif dan non administratif. Secara administratif berada di bawah naungan lembaga pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Sedangkan secara non administratif di bawah naungan lembaga adat yang dipimpin langsung oleh seorang *Ncuhi*, berpusat di *Ndoi Ncuhi Sang Haji Lua Lembo*. Meski bukan organisasi formal, namun lembaga adat di Desa Mbawa telah memiliki struktur organisasi. Sebagai seorang pemimpin adat, *Ncuhi* dibantu oleh beberapa orang yang menduduki posisi sekretaris, bendahara serta para anggota yang terdiri dari sepuluh orang.

Adapun susunan pengurus dalam kelembagaan adat masyarakat Donggo, Desa Mbawa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Ketua Adat : Ompu Yoseph
2. Sekretaris : Stefanus Jamaluddin
3. Bendahara : Ompu Mahmud
4. Anggota : 10 orang (yang berasal dari *ndoi-ndoi* selain *ndoi Ncuhi*).

Ketigabelas pengurus inilah yang bertugas mengorganisir segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat Donggo dengan posisinya sebagai masyarakat adat. Terkait dengan bidang politik yang menjadi fokus pembahasan dalam sub bab ini, pemimpin adat memiliki peran yang sangat penting. Meski tidak terlibat langsung dalam sistem pemerintahan, namun pemimpin agar memiliki andil menentukan seseorang yang menduduki jabatan struktural dalam pemerintahan. Terlebih di Desa Mbawa ini, masyarakat adatnya sangat percaya pada pemimpin adat mereka. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin adat, pasti akan diikuti oleh masyarakat adat. Misalnya saja terkait dengan cara pendukung terhadap pencalonan kepala desa yang nantinya akan menduduki jabatan struktural pemerintahan desa. Ketika

pemimpin adat mendukung salah satu calon yang dirasa tepat untuk memimpin desa Mbawa, maka masyarakat adat pun sudah tentu mengikuti apa yang menjadi pilihan pemimpin adat. Calon mana yang dibicarakan oleh pemimpin adat akan mendapatkan dukungan juga dari masyarakat adat. Kalau pemimpin adat mengatakan mendukung calon "A" (misalnya), maka masyarakat pun secara otomatis akan mendukung calon "A" juga. Masyarakat adat percaya bahwa apa yang menjadi pilihan pemimpin adat mereka adalah pilihan terbaik yang nantinya dapat membawa iklim positif untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa Mbawa.

Pengaruh pemimpin adat dalam menentukan cara dukungan terhadap calon pemimpin desa sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga kini pun masih berjalan demikian. Masyarakat adat memiliki kepercayaan yang penuh terhadap pemimpinnya. Termasuk hak dalam menentukan pilihan politik mereka juga atas andil dari pemimpin adat. Sehingga tidak mengherankan apabila para calon-calon yang berkompetisi untuk menduduki suatu jabatan tertentu seringkali berlomba-lomba untuk mendapat dukungan penuh dari pemimpin adat. Para calon ini tidak mencari dukungan langsung ke masyarakat, melainkan melalui pemimpin adat mereka.

Para calon ini biasanya datang ke rumah *Ncuhi* bertemu pemimpin adat lalu memohon doa restu atas pencalonan mereka. Apabila mereka berhasil dalam pencalonan tersebut, mereka akan datang kembali ke rumah *Ncuhi* untuk melakukan syukuran atas keberhasilan mereka. Syukuran biasanya dilakukan dengan penyembelihan hewan kambing atau kerbau kemudian dibagikan kepada masyarakat adat di Desa Mbawa dengan *NNcuhi* sebagai perantaranya.

Cara mencari dukungan politik masyarakat Desa Mbawa melalui pemimpin adatnya tidak hanya dilakukan oleh calon-calon kepala desa saja. Melainkan juga calon-calon anggota legislatif yang memiliki daerah pemilihan di Mbawa dan sekitarnya. Para calon ini percaya bahwa apabilan mereka datang dan memohon doa restu ke *Ncuhi*, mereka akan mendapatkan keberhasilan dalam

pencalonan ini. Apabila mereka berhasil pun mereka akan datang kembali untuk memenuhi janji mereka saat datang ke *Ncuhi* memohon doa restu. Janji terkait dengan program-program untuk mensejahterkan masyarakat Mbawa ataupun sekedar syukuran atas keberhasilan mereka. Namun perlu diingat bahwa meski pemimpin adat Desa Mbawa memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakatnya, tetapi pemimpin adat di sini tidak pernah memaksakan kehendaknya. Sekedar memberikan saran maupun referensi calon mana yang kiranya layak. Soal calon mana yang pada akhirnya menjadi pilihan masyarakat itu adalah hak dari masyarakat adat sendiri.

4.2. PERANAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN

A. Konsep Pembangunan

Pembangunan dalam konteksnya yang luas mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut di antaranya:

1. *Pembangunan adalah perubahan*

Perubahan adalah proses yang meliputi bentuk keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial menggambarkan suatu proses perkembangan masyarakat. Pada satu sisi perubahan sosial memberikan suatu ciri perkembangan atau kemajuan (*progress*) tetapi pada sisi yang lain dapat pula berbentuk suatu kemunduran (*regress*). Perubahan yang direncanakan yang datang dari dalam masyarakat yang bersangkutan, seringkali merupakan program perubahan yang dibuat oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu, biasanya para elite masyarakat, yang ditujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Soekanto, 1987).

2. *Pembangunan adalah pertumbuhan*

Pertumbuhan ialah kemampuan suatu wilayah untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme suatu negara dapat dikatakan sebagai organisme yang berhenti bertumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari kehidupan sebelumnya. Karena suatu negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah apabila pertumbuhan itu diperlakukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan (Soekanto, 1987).

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembanguan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Soekanto, 1987).

4. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya "titik jenuh yang absolut", yang setelah selesai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti: Keadilan sosial, Kemakmuran yang merata, Perlakuan yang sama di mata hukum, Kesejahteraan material, mental dan

spiritual, Kebahagiaan untuk semua, Ketentraman, dan Keamanan (Soekanto, 1987).

5. *Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi*

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan (Afifudin, 2010).

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan merupakan suatu rencana yang secara sadar direalisasikan demi terciptanya perubahan serta pertumbuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Saat ini program-program pembangunan banyak difokuskan di daerah-daerah pedesaan. Perhatian yang besar terhadap daerah pedesaan didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Selain itu program pembangunan di daerah pedesaan dilakukan untuk mengimbangi laju perkembangan pembangunan di daerah perkotaan.

Program-program dari pemerintah tersebut kemudian disalurkan melalui birokrasi pedesaan dan dilaksanakan atas dasar pengawasan desa. Program pembangunan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat mensukseskan program pembangunan selain dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan pemimpin yang bersedia tampil dalam setiap pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pelopor, berani, memberikan contoh dan teladan yang baik serta rela mengorbankan kepentingan pribadi, demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal di antaranya keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya di dalam menggerakkan semangat pembangunan (Mubyarto, 1993).

Masing-masing elemen memiliki peran untuk keberhasilan pembangunan sesuai dengan porsinya. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena satu dengan yang lain saling bergantung dan tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto, 1987). Tiga hal yang mencakup suatu peranan adalah: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi-posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat (Levinson dalam Soekanto, 1987).

B. Peran Pemimpin Adat dalam Pembangunan Masyarakat Donggo

Terkait dengan peranan pemimpin adat (*Ncuhi*) pada masyarakat Donggo, selain sebagai pemimpin adat yang lebih banyak terlibat dalam urusan adat istiadat, pemimpin adat di Donggo juga memiliki peran dalam pembangunan di Desa Mbawa. Peran *Ncuhi* dalam pembangunan di Desa Mbawa, khususnya pada masyarakat Donggo dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti:

1. Pembangunan Fisik

A. Perencanaan Pembangunan

Dalam pembangunan, perencanaan sangat perlu karena tanpa adanya suatu perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Todaro (2010:45) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, dalam perencanaan pembangunan kepala adat sangat

besar pengaruhnya, karena kepala adat adalah mediator pertama yang harus dilibatkan, tanpa adanya peran pemimpin adat program pembangunan tidak dapat berjalan.

B. Pelaksanaan Pembangunan

Pemimpin adat merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar mau bekerja demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Salah satu peran pemimpin adat pada pelaksanaan pembangunan atau gotong royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik dan mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pada masyarakat Donggo, pemimpin adat (*Ncuhi*) dibantu oleh *panggita* yang berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat. Salah satu wujud adanya pelaksanaan pembangunan secara fisik pada masyarakat Donggo terlihat dari arsitektur *Uma Ruka* (rumah masyarakat Donggo). Dimana arsitektur *Uma Ruka* ini terdiri dari jumlah tiang 9, 12, 16, dengan rincian beberapa ruangan seperti ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Atap *Uma Ruka* terbuat dari seng dan bagian dalamnya lebih banyak menggunakan bahan kayu seperti: kayu *sala* (*kayu sakda*) dan kayu *klanggo* (*kayu bango*). Selain itu ada pula bangunan *Uma Leme* yang merupakan rumah bagi *Ncuhi*. Tinggi bangunan bagi *Uma Leme* sekitar 4 meter lebih dan jumlah anak tangga untuk masuk ke *Uma Leme* harus berjumlah lima. Kayu yang digunakan untuk membangun *Uma Leme* seperti kayu konca, kayu sonokeling, kayu garu dan kayu bango.

2. Pembangunan Non Fisik

Peran pemimpin adat dalam pembangunan non fisik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu melestarikan nilai-nilai budaya serta menjadi penggerak dalam memberdayakan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam persepsi melestarikan nilai budaya diperoleh lingkup permasalahan dan kriteria yang

diperlukan untuk menilai gejala dan pengaruh teknologi dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan kompleks yang secara material memiliki unsur-unsur universal yaitu teknologi dan mata pencaharian. Seluruh unsur yang disebut kebudayaan, secara formal merupakan ekspresi kehidupan manusia, dengan kata lain kebudayaan dapat diartikan hasil kebudayaan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang masih ada agar tetap terjaga dari segala macam bentuk pengaruh.

Dalam hal melestarikan nilai-nilai budaya dapat dilihat dari adat istiadat yang tetap terjaga hingga saat ini. Upacara adat yang turun temurun dilaksanakan dari zaman nenek moyang pun masih terlaksana. Dari mulai upacara besar-besaran yang melibatkan seluruh anggota masyarakat adat Donggo hingga upacara kecil yang melibatkan hanya sebagian masyarakatnya. Upacara besar tersebut di antaranya *upacara raju*, *kebusirasa*, *kawiri*, *tulabala*. Sedangkan upacara kecil di antaranya *kebusiweki* (upacara untuk mendoakan pasangan yang baru saja menikah), upacara kelahiran serta upacara kematian. Pelaksanaan upacara-upacara tersebut merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat Donggo di Desa Mbawa.

Sedangkan dari segi pemberdayaan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui sudut pandang penerapan aturan-aturan adat. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengalami kemajuan yang sangat pesat, pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat adat masih kental terutama pada nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya. Hal ini terbukti dari masih diterapkannya aturan adat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja jika ada permasalahan, adolah yang menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah tokoh-tokoh adat, sedangkan aparat desa hanya sekedar mengetahui saja. Selain sebagai pemimpin adat yang menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat tradisional yang diyakini kebenarannya, seorang kepala adat juga berperan dalam membantu aparat pemerintah desa dan kecamatan

(pemimpin formal) guna membina dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

4.3. PERANAN DALAM BIDANG SOSIAL-EKONOMI

a. Bidang Sosial

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adat adalah aspek kepemimpinan, karena model kepemimpinan yang dikembangkan dalam suatu masyarakat adat sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat dalam komunitas tersebut. Pemimpin adat tidak lagi bertindak sendiri melainkan lebih sebagai fasilitator yang mau dan mampu menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya guna mencapai tujuan bersama.

Tujuan bersama tidak dapat dicapai tanpa adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat adat tersebut, dalam hal ini adalah *Ncuhi* serta masyarakat yang dipimpinnya. *Ncuhi* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat berusaha untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap aktivitas yang dipimpinannya. Baik itu yang menyangkut bidang politik, pembangunan maupun sosial-ekonomi. Dari aktivitas-aktivitas itulah dapat terlihat berbagai macam peranan pemimpin adat masyarakat Donggo. Di atas telah dijelaskan mengenai peranan pemimpin adat dalam bidang politik dan pembangunan. Pada sub bab ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai peran pemimpin adat dalam bidang sosial serta ekonomi.

Kaitannya dengan bidang sosial, pemimpin adat dalam lingkungan masyarakat Donggo memiliki banyak sekali peranan. Mulai dari penerapan hukum adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Donggo hingga memimpin secara langsung upacara-upacara adat. Kedua hal tersebut memiliki tujuan akhir yang sama yaitu untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan hidup masyarakat Donggo. Di sinilah terlihat bagaimana peran nyata dari seorang *Ncuhi* dalam hal kehidupan sosial masyarakatnya.

Didasarkan pada penerapan hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Donggo, pemimpin adat memiliki peran dalam memberdayakan nilai adat istiadat. Adapun hukum adat yang hingga kini masih diterapkan dalam masyarakat adat Donggo yaitu hukum tuna, siri dan saru. Pertama yaitu hukum tuna. Hukum tuna merupakan hukuman yang berlaku bagi masyarakat Donggo yang melanggar. Seperti misalnya mencuri dan hamil di luar nikah. Bagi mereka yang mencuri atau hamil di luar nikah akan dipanggil oleh ketua adat. Proses selanjutnya adalah adat yang memberikan hukuman. Efek dari hukum tuna ini adalah membuat masyarakat menjadi malu dan diharapkan menjadi jera. Kedua adalah hukum siri. Hukum siri mengatur hubungan antarsesama anggota masyarakat. Misalnya saja pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena suami tidak bekerja. Kedua belah pihak nantinya akan dipanggil ke rumah adat. Peran ketua adat di sini adalah perantara atau fasilitator untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Ketiga adalah hukum saru. Hukum ini mengatur tentang pembatalan dalam suatu perjanjian keluarga. Apabila terjadi pembatalan dalam suatu perjanjian keluarga, maka pihak yang membatalkan dapat dikenai denda berupa ganti kambing atau uang.

Merupakan suatu keharusan bagi masyarakat adat Donggo untuk mematuhi ketiga hukum adat tersebut. Hukum adat sebagai representasi nilai adat istiadat merupakan aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat bagi masyarakat adat. Oleh karenanya tidak boleh melanggar, apabila melanggar maka masyarakat harus menanggung konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Sedangkan peran pemimpin adat dalam upacara adat dapat dilihat saat memimpin upacara secara langsung. Berbicara mengenai upacara adat, ada beberapa upacara yang biasanya diselenggarakan oleh masyarakat Donggo. Upacara tersebut biasanya dipimpin langsung oleh *Ncuhi*. Di antaranya adalah upacara *raju*, *kebusirasa*, *kawiri* dan *tulabala*.

1. *Upacara Raju*

Upacara raju adalah upacara untuk membersihkan atau mem-berkatkan tanah yang akan ditanami tanaman dan menolak segala macam musuh yang ada di dalam tanaman tersebut. *Upacara raju* juga dapat diartikan sebagai upacara pembasmian hama dan penentuan musim tanam. Pelaksanaan *raju* menandakan sudah dekatnya waktu untuk membuka lahan pertanian. Di situlah letak peran *Ncuhi* dalam menentukan dan menilai kapan kira-kira waktu pelaksanaan dan waktu hujan akan turun.

Upacara raju sendiri dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam. Untuk penentuan waktu ditentukan oleh bulan (*Wura*). Ada tiga jenis upacara *Raju* yaitu *Raju Na'e*, *Raju To'i* dan *Raju To'i Poda*. Letak perbedaan dari ketiga jenis upacara *Raju* tersebut adalah dalam waktu pelaksanaan. *Raju Na'e* dilaksanakan selama tujuh hari. Kedua, *Raju To'i* dilaksanakan selama lima hari. *Raju to'i Poda* dilaksanakan selama tiga hari.

Dalam pelaksanaan *upacara raju* ini ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan. Seperti tidak boleh menjemur di tempat terbuka karena dapat mendatangkan musuh, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh membawa kayu secara terbuka, serta tidak boleh mengadakan jual beli di kampung. Sebelum melakukan upacara, dilakukan doa adat terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh *Ncuhi*.

Adapun penjelasan tahapan penyelenggaraan *upacara raju* secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Mbawa dari tiga pemeluk agama berkumpul di rumah tradisional *Uma Leme*. Anggota masyarakat Mbawa yang hadir di *Uma Leme* tidak ada pengelompokan berdasarkan agama maupun keyakinan.
2. Seluruh anggota masyarakat hadir berdoa melalui sarana sesaji *Toho ro dore* yaitu berupa *karado* beras yang ditumbuk halus yang dicampur dengan parutan kelapa dan garam serta dilengkapi dengan pisang dan sirih pinang. Harapan dari doa yang dilakukan agar upacara *Raju* lancar dan sukses.

3. Melakukan perburuan di Gunung Iku (*Lao nggalo* di Doro Iku) menuju ke bawah (*Lao Awa*) dengan maksud membuang segala penyakit tanaman melalui aliran air dari hulu ke hilir, karena aliran air sering membawa penyakit sehingga pengembaliannya juga harus lewat aliran air. Sesaji yang dibawa pada saat perburuan ini adalah sesaji yang telah didoakan di *Uma Leme*.
4. Setelah *Lao Awa*, dilanjutkan *Lao Ese* (menuju keatas). Perjalanan menuju ke atas ini dimaksudkan membuang hama berupa ulat, ular dan lain-lain. Binatang ulat, ular dan lain-lain dipercaya oleh para petani datangnya dari atas sehingga pengembaliannya ke arah atas.
5. Proses selanjutnya menuju *Lao ta da* (utara) untuk membuang belalang (*Kasanto ro komoa*). Binatang seperti belalang dipercaya datangnya dari utara, sehingga harus dikembalikan ke arah utara.
6. Selanjutnya menuju *Lao ta do* (selatan) untuk membuang hama tikus ke arah laut. Binatang tikus dipercaya oleh para petani etnik Donggo datangnya dari arah selatan, sehingga pengembaliannya ke arah laut.
7. Terakhir menuju *Sondosia*, untuk membuang semuanya ke arah laut agar lebur dengan air laut. Jika hama sudah dibuang ke laut harapan masyarakat Desa Mbawa agar hama tidak kembali mengganggu dan merusak tanaman. Pada saat membuang hama dan penyakit tanaman sesaji dilengkapi seekor ayam dan sebelum membuang semua hama ditempatkan pada tempat yang khusus sebagai rasa penghormatan.

Maksud dan tujuan akhir dari penyelenggaraan upacara *raju* yaitu mengusir hama dan penyakit tanaman. Jika hama dan penyakit sudah diusir maka harapan petani untuk mendapatkan hasil panen lebih yakin. Makin banyak mendapat tangkapan hama seperti ulat dan tikus pada saat penyelenggaraan *raju* maka semakin meyakinkan untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak.

Mengenai hasil panen tersebut juga dapat dilihat berdasarkan hasil berburu pada saat upacara *raju*. Apabila dalam berburu babi mendapatkan lebih banyak babi perempuan dibandingkan babi laki-laki, hal itu menandakan bahwa akan mendapatkan banyak curah hujan. Curah hujan yang banyak, berimplikasi pada kesuburan tanah dan hasil pertanian yang baik. Sebaliknya, apabila dalam berburu lebih banyak mendapatkan babi laki-laki dibandingkan babi perempuan maka menandakan curah hujan dan hasil panen sedikit. Dapat juga berarti curah hujan terlalu besar tetapi merugikan.

2. *Upacara Kebusirasa*

Upacara *kebusirasa* adalah upacara yang dilakukan sesudah masa panen. Biasanya hasil panen dibawa kerumah *Ncuhi (uma leme)* untuk kemudian didoakan secara bersama-sama. Seusai mendoakan hasil panen, masyarakat Donggo kemudian berkumpul untuk makan bersama. Mensyukuri atas hasil panen yang didapatkan.

3. *Upacara Kawiri*

Upacara kawiri merupakan upacara yang dilaksanakan dua atau tiga bulan setelah *upacara kebusirasa*. Upacara ini memiliki tujuan untuk menghindarkan anak-anak atau balita dari serangan penyakit seperti diare dan berbagai macam penyakit lain.

4. *Upacara Tulabala*

Upacara tulabala merupakan upacara tolak bala. Biasanya dilakukan setahun sekali. Pelaksanaan upacara ini dimaksudkan untuk mengusir roh jahat yang mendiami wilayah Mbawa. Masyarakat percaya bahwa ada roh jahat yang mengelilingi mereka karena mereka tinggal di daerah pegunungan. Agar hidup harmonis dan jauh dari gangguan roh jahat maka mereka lakukan *upacara tulabala* ini untuk pengusiran.

Keempat upacara tersebut adalah upacara yang harus dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Donggo dengan dipimpin

oleh *Ncuhi*. Apabila tidak dilaksanakan salah satu upacara tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dan harmonisasi hidup masyarakat Donggo pada khususnya dan masyarakat Desa Mbawa pada umumnya.

b. Bidang Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Donggo pada umumnya adalah bercocok tanam, khususnya tanaman pangan serta yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Seperti misalnya padi, jagung dan sayuran. Padi dan sayuran biasanya menjadi konsumsi sehari-hari. Sedangkan tanaman jagung biasanya ditanam untuk dijual ke pasar.

Mata pencaharian masyarakat Donggo dengan bercocok tanam sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Nenek moyang orang Donggo memiliki kebiasaan membuka hutan untuk bercocok tanam dengan cara memabat dan membakarnya. Sistem tebas-bakar dalam ladang berpindah disebut dengan "*ngoho*" (bahasa Donggo). Pada zaman dahulu praktik ladang berpindah dengan cara memabat dan membakar hutan belum berakibat fatal bagi keseimbangan alam karena jumlah lahan yang masih luas dan jumlah penduduk yang masih sedikit. Tetapi sejak setengah abad yang lalu keadaan sudah mulai membahayakan. Di mana jumlah penduduk semakin meningkat dan setiap keluarga menjalankan praktik berladang.

Keadaan yang semakin membahayakan itulah yang menyebabkan pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik pembabatan dan pembakaran hutan secara liar. Sesungguhnya kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut masalah perladangan dan lingkungan hidup telah dimulai sebelum zaman penjajahan Belanda. Sultan Bima pada masa kuno bahkan mengutuk wilayah-wilayah tertentu dalam perladangan yang sekiranya terlalu membahayakan keseimbangan alam. Oleh karena itu perladangan dilakukan secara teratur di bawah pimpinan para ketua adat, kepala desa dan pemuka ma-

syarakat. Pada jaman Belanda, semua tanah yang tidak termasuk tanah sawah, tegalan maupun kebun dianggap milik pemerintah. Termasuk hutan-hutan di seluruh wilayah Bima. Peraturan tersebut ditujukan untuk menghentikan perladangan liar. Tetapi sayangnya hal ini tidak berjalan dengan baik, apalagi di daerah-daerah yang terisolir seperti Donggo.

Baru pada tahun 1969 perladangan liar mulai dapat dikendalikan. Meski dapat dikurangi, tetapi tidak pernah dapat dihilangkan sama sekali. Pengendalian perladangan liar ini banyak menemui hambatan. Baik yang datang dari alam, penduduk maupun aparat keamanan yang kurang disiplin. Hal inilah yang menyebabkan praktik *ngoho* masih ada hingga sekarang, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi di daerah pedalaman.

Pada umumnya dalam mengolah tanah pertanian di Donggo dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kecuali anak-anak yang masih di bawah umur memang tidak diikutsertakan dalam mengolah lahan pertanian. Calon menantu yang dalam bahasa Donggo disebut dengan *ao rido* maupun menantu (*rido*) juga merupakan tenaga yang sangat membantu. Baik *ao rido siwe* (perempuan) atau *ao rido mone* (laki-laki). Sudah menjadi tradisi setempat, apabila seorang anak sudah dijodohkan ketika baru lahir maka akan ada rasa keterikatan antara dua keluarga yang bersangkutan. Seluruh keluarga *ao rido* sudah wajib saling membantu.

Meski setiap keluarga menggarap ladangnya masing-masing sebagai milik pribadi, namun ketika bekerja dilakukan secara bersama-sama dengan para tetangga yang lain. Apabila sudah memiliki *ao rido*, maka keluarga *ao rido* akan meminta bantuan kepada sanak keluarganya yang lain. Tidak ada yang bekerja secara individual, semua dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari proses memabat dan membakar hutan, memagari dan menjaga ladang, menanam bibit, mengusir hama hingga panen. Hanya saja terdapat pembagian tugas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Misalnya saja kaum laki-laki memiliki tugas dalam memagari dan menjaga ladang. Sementara kaum perempuan

memiliki tugas menanam bibit serta memanennya, walaupun dalam proses ini ada juga kaum laki-laki yang membantu. Selebihnya dilakukan secara bersama-sama. Pada saat pengusiran hama yang dilakukan pada pertengahan musim hujan dilakukan oleh seluruh warga kampung, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak muda.

Selain bercocok tanam, penduduk Donggo juga memiliki usaha sampingan lain berupa peternakan. Peternakan yang dilakukan oleh penduduk Donggo yaitu peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam dan juga babi. Sapi dan kerbau dijadikan modal dan digunakan untuk membajak sawah. Kuda biasanya diperah susunya untuk kemudian dijual pada masyarakat umum. Susu kuda liar dari Donggo ini bahkan sudah dikenal hingga luar Bima. Kambing dan ayam merupakan hewan ternak tambahan yang dilepas di daerah dekat perkampungan. Sedangkan babi biasanya dijadikan sebagai makanan persembahan untuk upacara atau sebagai konsumsi saat ada perayaan.

Dari aktivitas perekonomian masyarakat Donggo yang didominasi oleh sektor pertanian kemudian disusul oleh sektor peternakan ini mendapat dukungan langsung pemimpin adat yang disebut dengan *Ncuhi* tersebut. Dukungan tersebut dapat dilihat berdasarkan pengarahan yang diberikan oleh *Ncuhi* sebelum masa tanam. Pengarahan menyangkut cara kerja yang baik, waktu yang tepat untuk memulai menanam yang ditentukan berdasarkan hitungan adat (kalender adat) serta memimpin langsung upacara adat sebelum masa tanam (*upacara raju*) dan sesudah masa tanam (*kebusirasa*). Terlebih lagi *upacara raju* merupakan upacara yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan masa panen masyarakat Donggo. Dari upacara raju inilah, *Ncuhi* dapat menentukan waktu yang tepat untuk membuka lahan pertanian. Di samping itu *Ncuhi* juga dapat menentukan kapan kira-kira hujan akan turun dan berhasil tidaknya panen masyarakat Donggo. Oleh karenanya, peran *Ncuhi* ini sangat sentral sekali dalam menentukan keberhasilan masa tanam masyarakat Donggo. Keberhasilan tanam akan sejalan dengan keberhasilan ekonomi masyarakat.

Apabila hasil tanam meningkat, perekenomian juga meningkat. Namun sebaliknya, apabila hasil tanam menurun, ini juga akan berpengaruh pada menurunnya penghasilan masyarakat Donggo.

BAB V PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di tarik beberapa simpulan yaitu:

1. Masyarakat Bima khususnya suku Donggo, masih mempertahankan budaya dan tradisi lama yang telah mereka warisi sejak jaman nenek moyang. Pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala adat (*Ncuhi*), sampai sekarang masih mampu mempertahankan adat dan budayanya.
2. Kepala adat (*Ncuhi*) dan dibantu beberapa orang pengurus adat, selama ini menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Salah satu contoh misalnya, pemimpin adat telah mampu mendorong semangat masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan pembangunan.
3. Kepala adat (*Ncuhi*), beserta pengurus dan tokoh masyarakat, selain mendorong semangat masyarakat dalam pembangunan, juga telah berperan dalam melestarikan adat dan budaya tradisional masyarakat setempat, seperti upacara *raju*, *kawiri*, *kebusi rasa*, *tula bala* dan lain-lain.

Selain peran-peran di atas, pemimpin adat juga berperan dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Diantaranya dalam bidang politik, pembangunan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang politik telah mampu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilihan pimpinan kepala daerah maupun legislatif. Dalam bidang pembangunan telah mampu meningkatkan semangat masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan, seperti menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Sedangkan dalam bidang sosial ekonomi, telah mampu meningkatkan semangat dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, melalui usaha atau kegiatan di bidang pertanian. Dengan berhasilnya kegiatan dalam bidang pertanian, akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya, khususnya kebutuhan sandang maupun papan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan pemimpin adat suku Donggo telah mampu meningkatkan kemajuan masyarakat, untuk bisa mengejar ketertinggalan masyarakat lainnya, khususnya yang ada di Kabupaten Bima.

5.2. SARAN

Melalui kesempatan ini, ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan yaitu :

1. Dalam meningkatkan peranan pemimpin adat pada khususnya dan masyarakat Donggo pada umumnya, perlu adanya dukungan dan perhatian semua pihak, khususnya pemerintah.
2. Pemimpin adat (*Ncuhi*) dan pengurus yang ada di dalamnya, supaya terus meningkatkan peranannya dalam masyarakat. Di samping itu, selalu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, bila ada permasalahan yang perlu dipecahkan secara bersama-sama, khususnya dengan pemerintahan formal yang ada di tingkat desa, di bawah kepemimpinan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Gani. 2004. *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Yayasan Lengge.
- Afifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta: Bandung
- Aswantini dan Imron , M. Bashori. 2010. *Kepemimpinan Dalam Penelitian Dan Pengembangan*. Cibinong : Pusbindiklat Peneliti LIPI.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Kota Bima Dalam Angka 2016*.BPS Kota Bima.
- Basrowri. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Boedhihartono dkk. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Edisi Sistem Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Drajat, Untoro Hari. 2011.*Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa,Memperkuat Karakter Masyarakat Multikultural*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono.2007. *Kebudayaan Suku Bangsa Donggo Di Bima Nusa Tenggara Barat, Dalam Jurnal Penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional Edisi Keduapuluhtujuh No.27/VII/2007*. Denpasar: BPSNT Bali, NTB, NTT.
- Hendropuspito, D. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Kanisius: Yogyakarta
- Ismail, M. Hilir. 2004. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Penerbit Lengge: Mataram

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubyarto, 1993. *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Adytia Media: Yogyakarta.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi Edisi Ke-10*. Benyamin Molan, Penerjemah. Jakarta: Gramedia. Terjemahan dari: *Organizations Behavior*.
- Rush, M., dan Althoff, P. 1993. *Pengantar Sosiologi Politik, alih bahasa Kartini Kartono*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahidu, Djamaluddin. 2008. *Kampung Orang Bima*. Mataram: Studio 15.
- Setiadi, Elly M. Dan Kolip, Usman. 2011. *"Pengantar Sosiologi" Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana.
- Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suputra, Pande Made. 2004. *Peluang dan Tantangan Membangun Sumber Daya Manusia berbasis Etika*. Disampaikan pada " Sosialisasi Nilai dan Dialog Budaya Bali".
- Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta

Internet

<http://web.bimacenter.com/2012/05/asal-usul-masyarakat-bima-dou-mbojo.html>. Diakses tanggal 26 agustus 2016

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana asal-usul keberadaan masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima ?
2. Bagaimana struktur pemerintahan adat masyarakat Donggo di Desa Mbawa, kabupaten Bima ?
3. Apa saja bentuk organisasi/kelembagaan yang ada dalam masyarakat Donggo di Desa Mbawa, Kabupaten Bima ?
4. Bagaimana peranan pemimpin adat dalam bidang politik ?
5. Bagaimana peranan pemimpin adat dalam bidang pembangunan ?
6. Bagaimana peranan pemimpin adat dalam bidang sosial dan ekonomi ?
7. Apa saja potensi dan kendala yang dihadapi pemimpin adat dalam menjalankan peranannya dalam masyarakat ?
8. Apa ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi pemimpin adat dalam menjalankan peranannya dalam masyarakat ?
9. Apa saja sanksi yang dapat dikenakan bagi pemimpin adat yang melanggar dalam menjalankan peranannya ?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Muter
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Mbawa, Desa Mbawa
2. Nama : Yoseph
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kembentu, Desa, Desa Mbawa
3. Nama : Mahmud
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Mbawa 1, Desa Mbawa
4. Nama : Jamaludin
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Mbawa 2, Desa Mbawa

FOTO



Foto 1. Peta kabupaten Bima, propinsi Nusa Tenggara Barat.



Foto 2. Struktur organisasi pemerintah desa Mbawa, kecamatan Donggo, kabupaten Bima.



Foto 3. Ibu Imey (pegawai dinas kebudayaan) kabupaten Bima, memperkenalkan tim peneliti kepada aparat desa



Foto 4. Bapak Ngiwa memberikan informasi mengenai asal-usul masyarakat Donggo di desa Mbawa.



Foto 5. Pelaksanaan FGD (Focus Group Discution) di kantor desa Mbawa.



Foto 6. Peneliti sedang mengumpulkan literatur di perpustakaan (kabupaten Bima).

Masyarakat Bima khususnya Suku Donggo, masih mempertahankan budaya dan tradisi yang diwarisi sejak jaman nenek moyang. Pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala adat (Ncuhi), sampai sekarang masih mampu mempertahankan adat dan budayanya.

Kepala adat (Ncuhi) dan dibantu beberapa orang pengurus adat, selama ini menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Salah satu contoh misalnya, pemimpin adat mampu mendorong semangat masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Kepala adat (Ncuhi), beserta pengurus dan tokoh masyarakat, juga berperan dalam melestarikan adat dan budaya tradisional masyarakat setempat, seperti upacara raju, kawiri, kebusi rasa, tula bala dan lain-lain.

Pemimpin adat juga berperan dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Dalam bidang politik mampu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilihan pimpinan kepala daerah maupun legislatif. Dalam bidang pemerintahan mampu meningkatkan semangat masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan, seperti menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Dalam bidang sosial ekonomi mampu meningkatkan semangat dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui usaha atau kegiatan di bidang pertanian. Berhasilnya kegiatan dalam bidang pertanian, akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya, khususnya kebutuhan sandang, maupun papan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan pemimpin adat Suku Donggo telah mampu meningkatkan kemajuan masyarakat, untuk bisa mengejar ketertinggalan masyarakat lainnya, khususnya yang ada di Kabupaten Bima.



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara_books@yahoo.com

ISBN 978-602-356-



9 786023 156128 51

Perpustakaan
Jenderal